

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2021 – 2026



disusun oleh:

**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur dan syukur kehadirat Allah SWT, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 dapat diselesaikan. Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah ini merupakan dokumen perencanaan jangka menengah 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, strategi, program, kegiatan dan anggaran sesuai dengan tugas dan fungsi unit organisasi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah.

Sehubungan dengan berakhirnya periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun Anggaran 2016 - 2021, maka diperlukan penyesuaian pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lombok Tengah Periode Tahun 2021-2026, maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 sebagai dokumen perencanaan jangka menengah.

Rencana Strategis ini selanjutnya dipergunakan sebagai acuan setiap unit kerja lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah untuk perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun.

Praya, 8 September 2021

Kepala Dinas,



Ir. MUHAMMAD KAMRIN

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP 19651130 199203 1 011

DAFTAR ISI

		Hal.
	KATA PENGANTAR.....	i
	DAFTAR ISI	ii
Bab I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang.....	1
	1.2. Landasan Hukum	3
	1.3. Maksud dan Tujuan	5
	1.4. Sistematika Penulisan	5
Bab II	GAMBARAN PELAYANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH	7
	2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah	7
	2.2. Sumberdaya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah	26
	2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah	27
	2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	32
Bab III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH	37
	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	37
	Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah	38
	Telaahan RenstraK/Ldan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota	40
	Telaahan RencanaTata RuangWilayah dan KLHSRPJMD	45
	Penentuan Isu-isu Strategis.....	46
Bab IV	TUJUAN DAN SASARARAN	47
	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB	47
	Hubungan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	49

Bab V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	50
Bab VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN.....	56
Bab VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	72
Bab VIII	PENUTUP.....	74
Lampiran-lampiran		

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembangunan kelautan dan perikanan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan empat pilar pembangunan, yaitu *pro-poor* (pengentasan kemiskinan), *pro-job* (penyerapan tenaga kerja), *pro-growth* (akselerasi pertumbuhan ekonomi) dan *pro-environment* (pemulihan dan pelestarian lingkungan), dimana sector kelautan dan perikanan merupakan bagian integral dari pembangunan daerah Kabupaten Lombok Tengah dan secara prinsipil direncanakan serta disusun sebagai satu kesatuan perencanaan pembangunan nasional, dilakukan secara bersama oleh seluruh pemangku kepentingan, diintegrasikan dengan tata ruang wilayah dengan memperhatikan potensi dan prioritas daerah serta dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden hasil Pemilihan Umum tahun 2019, RPJM Nasional memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, Proyek Prioritas Strategis, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian / Lembaga, arah pembangunan kewilayahan dan lintas kewilayahan, Prioritas Pembangunan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

RPJMD harus mengacu dan selaras dengan RPJMN karena keberhasilan pembangunan didaerah akan menjadi bagian dari keberhasilan pembangunan nasional, dengan memperhatikan tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam mencapai sasaran Nasional.

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 -2026 merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan untuk merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, yang juga merupakan turunan dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 sebagaimana yang telah diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun

2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 15 ayat (1) dan pasal 19 ayat (2), bahwa instansi wajib menyusun Rencana Strategis Instansi untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan serta berkelanjutan.

Dokumen Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah diselaraskan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 dan RPJPD Kabupaten Lombok Tengah 2011-2031 yang mencerminkan pelaksanaan visi dan misi pembangunan Bupati dan Wakil Bupati terpilih 2021-2026. Adapun Visinya adalah Mewujudkan Masyarakat Lombok Tengah yang BERIMAN, SEJAHTERA, BERMUTU, MAJU dan BERBUDAYA (BERSATU JAYA), yang mana dalam implementasi pencapaian visi tersebut Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah akan mendorong melalui pelaksanaan Misi Ke-Empat yaitu: Pembangunan Ekonomi yang Berkeimbangan dan Berkelanjutan didukung Infrastruktur Berkualitas.

Selanjutnya dokumen Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 adalah merupakan cerminan dari beberapa program strategis dan unggulan, yang memiliki tujuan untuk pencapaian terwujudnya misi IV (Empat), melalui beberapa program strategis dan unggulan diantaranya:

- (1) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
- (2) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
- (3) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
- (4) Program strategis rutin lainnya.

Memperhatikan beberapa pertimbangan diatas, untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya paradigma pembangunan kelautan dan perikanan tetap selaras mengacup ada Undang-undang Nomor.31Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 45Tahun 2009 telah mengamanatkan bahwa tujuan pengelolaan perikanan adalah:

- (1) Meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil;
- (2) Meningkatkan penerimaan dan devisa negara;
- (3) Mendorong perluasan kesempatan kerja;
- (4) Meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan;
- (5) Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya ikan;

- (6) Meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah dan daya saing;
- (7) Meningkatkan ketersediaan bahan bak uuntuk industry pengolahan ikan;
- (8) Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya ikan, lahan pembudidayaan ikan dan lingkungan sumberdaya ikan; dan
- (9) Menjamin kelestarian sumberdaya ikan, lahan pembudidayaan ikan dan tata ruang

LandasanHukum

Landasan hokum dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Presiden RI Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005 -2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 1);

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 Nomor 2);

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2009 - 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 Nomor 26);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 Nomor Noreg Peraturan Daerah Provinsi NTB:12/297/2017)

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011 Nomor 8);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Nomor2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 17/PERMEN-KP/2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautandan Perikanan Tahun 2020–2024, tanggal 1 Februari 2021;

Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 disusun untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan sektor kelautandan perikanan di Kabupaten Lombok Tengah. Sedangkan tujuannya adalah sebagai pengendalidalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan kelautan danperikanan agar dapat berjalan secara terintegrasi, fokus, efektif, efisien dan responsive terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat.

Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 disusun dengan menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

(Bab ini berisi tentang gambaran umum penyusunan Renstra terdiri dari Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan).

Bab II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

(Bab ini menjelaskan dan menyajikan Gambaran Umum OPD selama beberapa tahun terakhir, yang meliputi Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD; Sumber Daya OPD ; Kinerja Pelayanan OPD, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD).

- Bab III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH
(Bab ini menyajikan permasalahan pembangunan sesuai sektor dan isu strategis yang memperhatikan isu / kebijakan internasional, regional, nasional, daerah sekitar dan kebijakan Nusa Tenggara Barat, yang meliputi Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah; Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih; Telaahan Renstra K/L; Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; Penentuan Isu-isu Strategis).
- Bab IV TUJUAN DAN SASARAN
(Bab ini berisi penyajian Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah).
- Bab V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
(Bab ini berisi rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang).
- Bab VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
(Pada bab ini disajikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif).
- Bab VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
(Bab ini berisi indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD).
- Bab VIII PENUTUP
(Bab ini menguraikan tentang kaidah – kaidah pelaksanaan renstra).

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah dibentuk dan mempunyai tugas pokok dan fungsinya didasarkan atas Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 3 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi diatur berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Tengah (Perbup) Nomor 83 tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah

Pada pasal 2 Perbup Nomor 83 Tahun 2016, dinyatakan bahwa kedudukan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut:

1. Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah di bidang Kelautan dan Perikanan;
2. Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
3. Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara administrasi dikoordinasikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Sedangkan Tugas Pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah diatur dalam pasal 3 dan 4 Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 83 tahun 2016 yaitu:

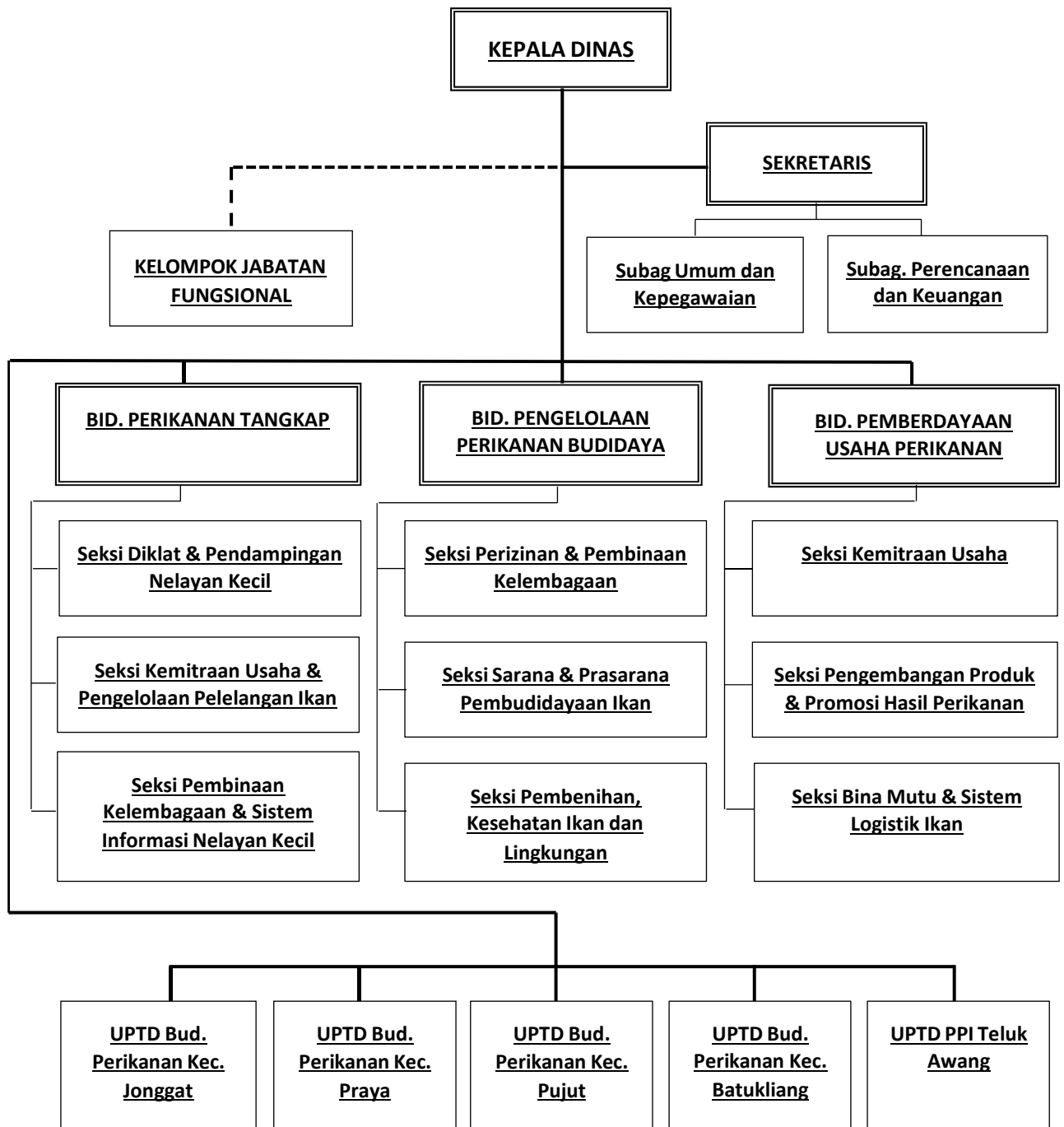
1. Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten berdasarkan asas otonomi, tugas pembantuan dan dekonsentrasi.
2. Untuk melaksanakan tugas Pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 diatas Dinas Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:
 - a) Perumusan kebijakan Perikanan Tangkap, Pengelolaan Perikanan Budidaya dan Pemberdayaan Usaha Perikanan;

- b) Pelaksanaan Kebijakan Perikanan Tangkap, Pengelolaan Perikanan Budidaya dan Pemberdayaan Usaha Perikanan;
- c) Evaluasi dan pelaporan Perikanan Tangkap, Pengelolaan Perikanan Budidaya dan Pemberdayaan Usaha Perikanan;
- d) Pelaksanaan Administrasi Dinas dibidang Kelautan dan Perikanan;
- e) Pelaksanaan Fungsi Lain yang terkait Bidang Kelautan dan Perikanan yang diberikan oleh Bupati.

Struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana tertuang dalam pasal 5 Perbup nomor 83 tahun 2016 terdiri dari:

- a. Unsur Pimpinan adalah KepalaDinas;
- b. Sekretariat terdiri dari:
 - (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - (2) Subbagian Perencanaan dan Keuangan
- c. Unsur Pelaksana adalah Bidang terdiri dari:
 - 1) BidangPengelolaan Perikanan Budidaya, terdiri dari:
 - (a) Seksi Perizinan dan Pembinaan Kelembagaan;
 - (b) Seksi Sarana dan Prasarana Pembudidaya Ikan;
 - (c) Seksi Pembenihan, Kesehatan Ikan dan Lingkungan.
 - 2) Bidang Perikanan Tangkap, terdiri dari:
 - (a) Seksi Diklat dan Pendampingan Nelayan Kecil;
 - (b) Seksi Kemitraan Usaha dan Pengelolaan Pelelangan Ikan;
 - (c) Seksi Pembinaan Kelembagaan dan sistim Informasi Nelayan Kecil.
 - 3) Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan terdiri dari:
 - (a) SeksiKemitraan Usaha;
 - (b) Seksi Pengembangan Produk dan Promosi Hasil Perikanan; dan
 - (c) Seksi Bina Mutu dan Sistim Logistik Ikan.
 - 4) Kelompok Jabatan Fungsional
 - 5) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Gambar 2.1
Bagan Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten
Lombok Tengah sebagaimana Gambar Bagan Berikut:



A. Sekretariat

1. Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun rencana / program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan pemerintahan dibidang sekretariat.
2. Melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi Ketatausahaan, Umum, Kepegawaian, Keuangan, Perlengkapan dan Pemeliharaan kantor.
3. Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
4. Untuk melaksanakan tugas, sekretaris menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pengkoordinasian Penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Lingkup Dinas.;
 - b. Pengkoordinasian Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) / Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Program kerja dinas
 - c. Pelaksanaan pelayanan teknis Administratif kepada seluruh unit kerja Lingkup dinas;
 - d. Pengkoordinasian penyusunan standar pelayanan minimal dan standar prosedur tetap pelaksanaan kegiatan lingkup dinas;
 - e. Perumusan dan penjabaran kebijakan teknis penyelenggaraan administrasi umum, perencanaan keuangan kepegawaian dan perlengkapan;
 - f. Pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas dinas
 - g. Pengkoordinasian Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas agar terjalin kerjasama yang baik
 - h. Pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi penyelenggaraan tugas sekretariat dengan SKPD dan instansi terkait;
 - i. Pelaksanaan pengaturan, pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan.
 - j. Pelaksanaan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sekretariat;
 - k. Pelaksanaan tugas lainnya yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat membawahi:

- a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok memimpin, mendata, merencanakan, mengatur, mengawasi, dan mengkoordinasikan tugas bawahan dalam pelaksanaan tugas urusan perencanaan dan keuangan.

Sub bagian perencanaan dan keuangan mempunyai fungsi:

- Pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan dan penetapan kinerja lingkup Dinas;
 - Penyusunan RKA/DPA dan Program Kerja Dinas;
 - Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data, dan penyebaran laporan data;
 - Penyusunan rencana dan mengelola anggaran Dinas
 - Pembuatan laporan dan evaluasi penggunaan anggaran keuangan;
 - Penyusunan usulan untuk perbaikan anggaran dan pengelolaan keuangan;
 - Pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan yang diterapkan;
 - Pelaksanaan pembuatan evaluasi dan pelaporan kegiatan;
 - Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait kegiatan perencanaan dan keuangan;
 - Pelaksanaan Monev dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian;
 - Pelaksanaan tugas lainnya yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi, dan mengkoordinasikan, kegiatan bawahan dalam penusunan program dan pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian, rumah tangga, protocol dan perlengkapan.

Rincian tugas Subbagian Umum dan perlengkapan, adalah sbb:

- Penyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Program Kerja Sub Bagian;
- Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan administrasi kepegawaian, rumah tangga, protokol, hubungan masyarakat dan perlengkapan;
- Pengumpulan, pengolahan, dan analisis data kepegawaian dan kebutuhan perlengkapan;

- Pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian perlengkapan inventaris kantor sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Penyiapan bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksana pelaksanaan tugas Dinas;
- Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian lingkup Dinas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan PNS lingkup Dinas;
- Pengkoordinasian pelaksanaan tugas pengurus dan atau penyiapan barang;
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian;
- Pelaksanaan tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

B. Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya

Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan perikanan budidaya

Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya menyelenggarakan fungsi:

- ❖ Perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan kinerja Bidang;
- ❖ Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/ Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan penetapan kinerja bidang;
- ❖ Penyiapan koordinasi di bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya
- ❖ Fasilitasi perumusan kebijakan di bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya Evaluasi dan pelaporan tugas
- ❖ Pelaksanaan kebijakan di bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya
- ❖ Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang;
- ❖ Pelaksanaan tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Perikanan Budidaya membawahi:

- a. Seksi Perizinan dan Pembinaan Kelembagaan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan perizinan dan pembinaan kelembagaan.

Rincian tugas Seksi Perizinan dan Pembinaan Kelembagaan mempunyai fungsi:

- Pengumpulan data, identifikasi dan analisis di bidang perizinan dan pembinaan kelembagaan;
 - Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perizinan dan pembinaan kelembagaan
 - Pelaksanaan kebijakan di bidang perizinan dan pembinaan kelembagaan
 - Monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan dan pembinaan kelembagaan
 - Pelaksanaan tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya
- b. Seksi Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan.

Rincian Tugas Seksi Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan mempunyai fungsi:

- Pengumpulan data, identifikasi dan analisis di bidang pengelolaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan
- Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan

- Monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan
 - Pelaksanaan tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya
- c. Seksi Perbenihan, Kesehatan Ikan, dan Lingkungan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan dan penyediaan benih ikan, calon induk dan induk ikan yang bermutu, pelestarian calon induk, induk dan/atau benih ikan, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan dan pembinaan mutu pakan ikan dan obat ikan yang digunakan pembudidaya ikan.

Rincian Tugas Seksi Perbenihan, Kesehatan Ikan, dan Lingkungan mempunyai fungsi:

- Pengumpulan data, identifikasi dan analisis di bidang pengelolaan dan penyediaan benih ikan, calon induk dan induk ikan yang bermutu, pelestarian calon induk, induk dan/atau benih ikan, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan dan pembinaan mutu pakan ikan dan obat ikan yang digunakan pembudidaya ikan
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan dan penyediaan benih ikan, calon induk dan induk ikan yang bermutu, pelestarian calon induk, induk dan/atau benih ikan, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan dan pembinaan mutu pakan ikan dan obat ikan yang digunakan pembudidaya ikan
- Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan dan penyediaan benih ikan, calon induk dan induk ikan yang bermutu, pelestarian calon induk, induk dan/atau benih ikan, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan dan pembinaan mutu pakan ikan dan obat ikan yang digunakan pembudidaya ikan
- Monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan dan penyediaan benih ikan, calon induk dan induk ikan yang bermutu, pelestarian calon induk, induk dan/atau benih ikan, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan dan pembinaan mutu pakan ikan dan obat ikan yang digunakan pembudidaya ikan

- Pelaksanaan tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

C. Bidang Perikanan Tangkap

Bidang Perikanan Tangkap dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan bidang pemberdayaan nelayan kecil.

Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Perikanan Tangkap menyelenggarakan fungsi:

- Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/ Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan penetapan kinerja bidang
- Perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan kinerja Bidang
- Penyiapan bahan penyusunan pedoman petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan perikanan tangkap
- Penyiapan koordinasi di bidang diklat dan pendampingan nelayan kecil, kemitraan usaha dan pengelolaan pelelangan ikan, dan pembinaan kelembagaan dan sistem informasi nelayan kecil
- Fasilitasi perumusan kebijakan di bidang diklat dan pendampingan nelayan kecil, kemitraan usaha dan pengelolaan pelelangan ikan, dan pembinaan kelembagaan dan sistem informasi nelayan kecil
- Pelaksanaan kebijakan di bidang diklat dan pendampingan nelayan kecil, kemitraan usaha dan pengelolaan pelelangan ikan, dan pembinaan kelembagaan dan sistem informasi nelayan kecil
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan perikanan tangkap
- Pelaksanaan tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

Bidang Perikanan Tangkap membawahi:

- a. Seksi Diklat dan Pendampingan Nelayan Kecil dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan nelayan kecil.

Rincian Tugas Seksi Diklat dan Pendampingan Nelayan Kecil mempunyai fungsi:

- Penyusunan Rencana Kerja Anggaran/ Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/ DPA) dan program kerja seksi
 - Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis seksi
 - Pengumpulan data, identifikasi dan analisis di bidang pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan nelayan kecil
 - Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan nelayan kecil
 - Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan nelayan kecil
 - Monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan nelayan kecil
 - Pelaksanaan tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya
- b. Seksi Kemitraan Usaha dan Pengelolaan Pelelangan Ikan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengembangan usaha dan Pengelolaan Pelelangan Ikan

Rincian Tugas Seksi Kemitraan Usaha dan Pengelolaan Pelelangan Ikan mempunyai fungsi:

- Penyusunan Rencana Kerja Anggaran/ Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/ DPA) dan program kerja seksi
- Pengumpulan data, identifikasi dan analisis di bidang kemitraan usaha dan Pengelolaan Pelelangan Ikan
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kemitraan usaha dan Pengelolaan Pelelangan Ikan
- Pelaksanaan kebijakan di bidang kemitraan usaha dan Pengelolaan Pelelangan Ikan
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program/ kegiatan seksi
- Pelaksanaan tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

- c. Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Sistem Informasi Nelayan Kecil dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembinaan kelembagaan nelayan kecil serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi kepada nelayan kecil
- Rincian Tugas Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Sistem Informasi Nelayan Kecil mempunyai fungsi
- Penyusunan Rencana Kerja Anggaran/ Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/ DPA) dan program kerja seksi
 - Pengumpulan data, identifikasi dan analisis di bidang pembinaan kelembagaan dan informasi kepada nelayan kecil
 - Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pembinaan kelembagaan dan informasi kepada nelayan kecil
 - Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan kelembagaan dan informasi kepada nelayan kecil
 - Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program/ kegiatan seksi
 - Pelaksanaan tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

D. Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan

Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan bidang pemberdayaan usaha perikanan.

Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- Penyiapan koordinasi di bidang pemberdayaan usaha perikanan
- Fasilitasi perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan usaha perikanan
- Pelaksanaan Kebijakan di Bidang pemberdayaan usaha perikanan
- Monitoring, Evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan usaha perikanan
- Pelaksanaan tugas – tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan membawahi:

- a. Seksi Kemitraan Usaha dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan fasilitasi kemitraan usaha;

Rincian Tugas Seksi Kemitraan Usaha mempunyai fungsi:

- Pengumpulan data, identifikasi dan analisis di bidang kemitraan usaha
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kemitraan usaha
- Pelaksanaan kebijakan di bidang kemitraan usaha
- Monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kemitraan usaha
- Pelaksanaan tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

- b. Seksi Pengembangan Produk dan Promosi Hasil Perikanan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengembangan produk dan promosi hasil perikanan

Rincian Tugas Seksi Pengembangan Produk dan Promosi Hasil Perikanan mempunyai fungsi:

- Pengumpulan data, identifikasi dan analisis di bidang pengembangan produk dan promosi hasil perikanan
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan produk dan promosi hasil perikanan
- Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan produk dan promosi hasil perikanan
- Monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan produk dan promosi hasil perikanan
- Pelaksanaan tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

- c. Seksi Bina Mutu dan Sistem Logistik Ikan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan Bina Mutu dan Sistem Logistik Ikan.

Rincian Tugas Seksi Bina Mutu dan Sistem Logistik Ikan mempunyai fungsi:

- Pengumpulan data, identifikasi dan analisis di bidang bina mutu dan sistem logistic ikan
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang bina mutu dan sistem logistic ikan
- Pelaksanaan kebijakan di bidang bina mutu dan sistem logistic ikan
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program/ kegiatan seksi
- Pelaksanaan tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

E. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Dalam Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan Air Tawar, Unit Pelaksana Teknis Tempat Pelelangan Dan Rantai Dingin Teluk Awang Dan Unit Pelaksana Teknis Balai Budidaya Ikan Air Payau Kidang Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah pada Pasal 2 dibentuk UPTD pada Dinas Kelautan dan Perikanan, meliputi: a) UPTD Balai Benih Ikan Air Tawar, b) UPTD Tempat Pelelangan Ikan dan Rantai Dingin Teluk Awang Tipe A, c) UPTD Balai Budidaya Ikan Air Payau Kidang Tipe A.

a. UPTD Balai Benih Ikan Air Tawar

UPTD Balai Benih Ikan Air Tawar merupakan UPTD dari Dinas Kelautan dan Perikanan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang terkait pengelolaan pembenihan ikan air tawar yang dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas. UPTD Balai Benih Ikan Air Tawar terdiri dari:

1. UPTD Balai Benih Ikan Air Tawar Pemepek tipe A
2. UPTD Balai Benih Ikan Air Tawar Aik Bukak tipe A
3. UPTD Balai Benih Ikan Air Tawar Gerunung tipe B
4. UPTD Balai Benih Ikan Air Tawar Bonjeruk tipe B

Susunan Organisasi Balai Benih Ikan Air Tawar Tipe A, meliputi: 1) Kepala UPTD; 2) Sub Bagian Tata Usaha; 3) Kelompok Jabatan Fungsional. Sedangkan Susunan Organisasi Balai Benih Ikan Air Tawar Tipe B, meliputi: 1) Kepala UPTD; 2) Kelompok Jabatan Fungsional.

Kepala UPTD Balai Benih Ikan Air Tawar Tipe A mempunyai tugas memimpin, melaksanakan, merencanakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi kegiatan pengelolaan pembenihan ikan air tawar

Dalam melaksanakan tugas Kepala UPTD Balai Benih Ikan Air Tawar Tipe A memiliki fungsi:

- ❖ Penyusunan rencana kerja, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas lingkup UPTD
- ❖ Pelaksanaan kewenangan operasional Dinas di bidang Pembenihan Ikan Air Tawar
- ❖ Pengkoordinasian penyediaan fasilitas tempat melaksanakan adopsi dan adaptasi teknik pembenihan
- ❖ Pengkoordinasian ketersediaan benih untuk keperluan budidaya dan penebaranbenih ikan di perairan umum;
- ❖ Penyusunan rencana pengembangan sarana dan prasarana di lingkungan Balai Benih Ikan Air Tawar
- ❖ Pemungutan retribusi penjualan benih ikan
- ❖ Pengawasan dan pengendalian mutu induk dan benih ikan air tawar
- ❖ Penyebaran benih hasil teknologi pembenihan yang teruji di lapangan kepada Usaha Pembenihan Rakyat
- ❖ Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- ❖ Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya

Kepala UPTD Balai Benih Ikan Air Tawar Tipe B mempunyai tugas memimpin, melaksanakan, merencanakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi kegiatan pengelolaan pembenihan ikan air tawar

Dalam melaksanakan tugas Kepala UPTD Balai Benih Ikan Air Tawar Tipe B memiliki fungsi:

- Penyusunan rencana kerja, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas lingkup UPTD
- Pelaksanaan kewenangan operasional Dinas di bidang Pembenihan Ikan Air Tawar

- Pengkoordinasian penyediaan fasilitas tempat melaksanakan adopsi dan adaptasi teknik pembenihan
- Pengkoordinasian ketersediaan benih untuk keperluan budidaya dan penebaran benih ikan di perairan umum
- Penyusunan rencana pengembangan sarana dan prasarana di lingkungan Balai Benih Ikan Air Tawar
- Pemungutan retribusi penjualan benih ikan
- Pengawasan dan pengendalian mutu induk dan benih ikan air tawar
- Penyebaran benih hasil teknologi pembenihan yang teruji di lapangan kepada Usaha Pembenihan Rakyat
- Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

UPTD Balai Benih Ikan Air Tawar Tipe A, membawahi:

1. Sub Bagian Tata Usaha Balai Benih Ikan Air Tawar Tipe A

Sub Bagian Tata Usaha UPTD Balai Benih Ikan Air Tawar Tipe A dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas yang meliputi perencanaan program, penatausahaan keuangan dan aset, pengelolaan urusan umum dan kepegawaian

Kepala Sub Bagian Tata Usaha memiliki fungsi:

- Menyusun konsep program kerja dan anggaran lingkup UPTD
- Menyusun pedoman pelaksanaan dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas ketatausahaan
- Melaksanakan pengelolaan surat menyurat
- Melaksanakan pengelolaan dokumentasi, dan kearsipan
- Melaksanakan pengelolaan keuangan;
- Melaksanakan pengelolaan kepegawaian
- Melaksanakan pelayanan administratif lingkup UPTD
- Melaksanakan pengelolaan kerumah tanggaan dan aset / Barang Milik Daerah lingkup UPTD
- Melaksanakan pengelolaan Kerjasama dan kehumasan
- Melaksanakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai bidang tugasnya.

b. UPTD Tempat Pelelangan Ikan dan Rantai Dingin Teluk Awang

UPTD Tempat Pelelangan Ikan dan Rantai Dingin Teluk Awang merupakan UPTD dari Dinas Kelautan dan Perikanan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang terkait pengelolaan tempat pelelangan ikan dan pengelolaan rantai dingin yang dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

Susunan Organisasi UPTD Tempat Pelelangan Ikan dan Rantai Dingin Teluk Awang, meliputi: 1) Kepala UPTD; 2) Sub Bagian Tata Usaha; 3) Kelompok Jabatan Fungsional.

1. Kepala UPTD Tempat Pelelangan Ikan dan Rantai Dingin Teluk Awang

Kepala UPTD Tempat Pelelangan Ikan dan Rantai Dingin Teluk Awang mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas UPTD yang meliputi perencanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang lingkup pengelolaan tempat pelelangan ikan dan rantai dingin.

Kepala UPTD Tempat Pelelangan Ikan dan Rantai Dingin Teluk Awang memiliki fungsi:

- a. Penyusunan program, kegiatan, rencanakerja, dan anggaran Tempat Pelelangan Ikan dan Rantai Dingin Teluk Awang;
- b. Penyusunan pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis penyelenggaraan kegiatan internal UPTD;
- c. Pelaksanaan jual beli ikan;
- d. Pemungutan retribusi pelelangan ikan;
- e. Pengelolaan pabrik es lingkup UPTD;
- f. Penyusunan rencana pengembangan sarana prasarana pelelangan ikan dan rantai dingin;
- g. Pengelolaan sanitasi tempat pengelolaan ikan dan rantai dingin;
- h. Pengendalian dan pengawasan produksipenangkapan ikan;
- i. Pelaksanaan pengelolaan administrasi, data, dan informasi pengelolaan tempat pelelangan ikan dan rantai dingin;

- j. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD Tempat Pelelangan Ikan dan Rantai Dingin Teluk Awang.

2. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas yang meliputi perencanaan program, penatausahaan keuangan dan aset, pengelolaan urusan umum dan kepegawaian.

Kepala Tata Usaha memiliki fungsi:

- a. Menyusun konsep program kerja dan anggaran lingkup UPTD;
 - b. Menyusun pedoman pelaksanaan dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas ketatausahaan;
 - c. Melaksanakan pengelolaan surat menyurat;
 - d. Melaksanakan pengelolaan dokumentasi, dan kearsipan;
 - e. Melaksanakan pengelolaan keuangan;
 - f. Melaksanakan pengelolaan kepegawaian;
 - g. Melaksanakan pelayanan administrative lingkup UPTD;
 - h. Melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan dan asset / barang milik daerah lingkup UPTD;
 - i. Melaksanakan pengelolaan Kerjasama dan kehumasan
 - j. Melaksanakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan; dan
 - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai bidang tugasnya.
- ## 3. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan serta bertanggung jawab kepada Kepala UPTD. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya; Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

c. UPTD Balai Budidaya Ikan Air Payau Kidang

UPTD Balai Budidaya Ikan Air Payau Kidang merupakan UPTD dari Dinas Kelautan dan Perikanan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang terkait pembudidayaan ikan air payau yang dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

Susunan Organisasi UPTD Balai Budidaya Ikan Air Payau Kidang, meliputi: 1). Kepala UPTD, 2). Sub Bagian Tata Usaha, 3). Kelompok Jabatan Fungsional.

1. Kepala UPTD

Kepala UPTD Balai Budidaya Ikan Air Payau Kidang mempunyai tugas memimpin pelaksanaan Tugas UPTD yang meliputi perencanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang lingkup pembudidayaan ikan air payau.

Kepala UPTD Balai Budidaya Ikan Air Payau Kidang memiliki fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas lingkup UPTD;
- b. Pelaksanaan kewenangan operasional Dinas di bidang pembudidayaan ikan air payau;
- c. Pengkoordinasian penyediaan fasilitasi tempat melaksanakan adopsi dan adaptasi teknik pembenihan ikan air payau;
- d. Pengkoordinasian ketersediaan benih untuk keperluan budidaya dan penebaran benih ikan air payau di perairan umum;
- e. Penyusunan rencana pengembangan sarana dan prasarana di lingkungan Balai Budidaya Ikan Air Payau;
- f. Pengawasan dan pengendalian mutu induk dan benih ikan air payau;
- g. Penyebaran benih hasil teknologi pembenihan yang teruji di lapangan kepada Usaha Pembenihan Rakyat;
- h. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

2. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas yang meliputi perencanaan program, penatausahaan keuangan dan aset, pengelolaan urusan umum dan kepegawaian.

Kepala Tata Usaha memiliki fungsi:

- a. Menyusun konsep program kerja dan anggaran lingkup UPTD;
- b. Menyusun pedoman pelaksanaan dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas ketatausahaan;
- c. Melaksanakan pengelolaan surat menyurat;
- d. Melaksanakan pengelolaan dokumentasi, dan kearsipan;
- e. Melaksanakan pengelolaan keuangan;
- f. Melaksanakan pengelolaan kepegawaian;
- g. Melaksanakan pelayanan administrative lingkup UPTD;
- h. Melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan dan asset / barang milik daerah lingkup UPTD;
- i. Melaksanakan pengelolaan Kerjasama dan kehumasan
- j. Melaksanakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai bidang tugasnya.

3. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan serta bertanggung jawab kepada Kepala UPTD. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya; Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja; Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

Sumberdaya Perangkat Daerah (PD)

Kepegawaian

Jumlah keseluruhan pegawai di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah adalah sebanyak 55 orang dengan rincian sebanyak 43 orang PNS, Pegawai Tidak Tetap sebanyak 2 orang dan Honor Dinas 10 orang (Suka Rela), dengan rincian Pegawai negeri Sipil (PNS) sebagai berikut:

- ❖ Dilihat dari jenis kelamin, Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah terdiri dari:
 - Laki-laki :34 orang (75,55 %)
 - Wanita :11 orang (24,44%)
- ❖ Berdasarkan tingkat pendidikan, Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah terdiri dari:
 - S2 : 3 orang (6.67%)
 - S1 : 26 orang (57.78%)
 - Diploma : 2 orang (4.1%)
 - SMA : 13 orang (28.89%)
 - SMP : - orang (0%)
 - SD : 1 orang (2.22%)
- ❖ Sedangkan dilihat dari jenjang secara struktural, Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah terdiri dari:
 - Eselon II :1 orang,
 - Eselon III :4 orang,
 - Eselon IV/a :12 orang,
 - Eselon IV/b : 5 Orang
 - JFU : 23 orang

Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Secara umum Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kelautan dan perikanan berdasarkan atas asas otonomidan tugas pembantuan. Dalam pelaksanaan tugasnya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah berkoordinasi dengan instansi terkait pada pemerintahan daerah dan provinsi serta instansi vertical dibawah Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

Pada pelaksanaan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh sekretariat dan bidang-bidang sesuai dengan fungsi teknisnya di dalam mengkoordinasikan kegiatan, antara lain untuk kegiatan administrasi, perencanaan anggaran dan evaluasi dilaksanakan oleh sekretariat, untuk pelaksanaan teknis kegiatan perikanan tangkap dilaksanakan oleh bidang perikanan tangkap, kegiatan perikanan budidaya dilaksanakan oleh Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya dan untuk kegiatan Pemberdayaan Usaha Perikanan dilaksanakan oleh bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan

Hasil pencapaian kinerja pelayanan di bidang kelautan dan perikanan dan alokasi anggaran selama kurun waktu 2016-2020 disajikan pada Tabel 2.1 dan Tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2016 - 2021

7	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)				71.899,00	72.615,00	73.341,10	74.074,51	74.815,26	93.245,81	98.594,08	73.341,14	75.075,53	65.233,15	129,69	135,78	100,00	101,35	87,19
	- Produksi Rumput Laut				38.106,47	38.485,95	38.870,78	39.259,49	39.652,09	62.522,00	67.012,34	39.308,70	43.740,91	29.631,92	164,07	174,12	101,13	111,41	74,73
	- Produksi Ikan				33.792,53	34.129,05	34.470,32	34.815,02	35.163,17	30.723,81	31.581,74	34.032,44	31.334,62	35.601,23	90,92	92,54	98,73	90,00	101,25
2	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)				2.362,00	2.390,40	2.419,00	2.448,03	2.477,40	2.363,70	2.394,60	2.896,50	2.950,80	3.039,30	100,07	100,18	119,74	120,54	122,68
3	Produksi Produk Olahan Hasil Perikanan (Ton)				4.084,03	4.165,70	4.249,01	4.334,00	4.420,68	4.377,84	4.331,08	4.140,89	4.414,36	4.405,45	107,19	103,97	97,46	101,85	99,66
4	Produksi Garam Rakyat (Ton)				3.178,00	3.178,00	3.242,00	3.307,00	3.373,00	1.676,31	1.214,33	3.202,00	3.708,98	3.438,15	52,75	38,21	98,77	112,16	101,93

Berdasarkan Tabel 2.1 tersebut, bahwa terdapat 4 (empat) indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan yaitu:

- 1) Produksi Perikanan Budidaya (ton); terdiri dari:
 - a). Produksi Rumput Laut (Ton)
 - b). Produksi Ikan (Ton)
- 2) Produksi Perikanan Tangkap (Ton);
- 3) Produksi Produk Olahan Hasil Perikanan (Ton); dan
- 4) Produksi Garam Rakyat (Ton).

Kinerja capaian produksi kelautan dan perikanan Kabupaten Lombok Tengah dalam kurunwaktu lima tahun terakhir periode renstra tahun 2016-2021, yaitu produksi produksi perikanan budidaya dan Produksi Olahan Hasil Perikanan. Mengalami fluktuasi Sedangkan Produksi Perikanan Tangkap dan Produksi Garam Rakyat cenderung naik pada tiap tahunnya.

Dari 4 indikator kinerja tersebut, secara umum realisasi pencapaian target kinerja tergolong baik. Hal ini dapat dilihat dari rasio capaian yaitu dengan membandingkan realisasi dan target lebih dari 90%. Hal ini didukung oleh adanya program kegiatan baik yang bersumber dari APBD maupun APBN.

Pada Tahun 2020 realisasi produksi perikanan budidaya sebesar 65.233,15 Ton atau setara dengan 87,19%, hal ini di karenakan rendahnya produksi rumput laut. Alih Fungsi lahan yang semula merupakan kawasan budidaya rumput laut, saat ini berubah menjadi kawasan pariwisata. Hal tersebut menjadi faktor utama menurunnya produksi rumput laut.

Sedangkan capaian produksi garam grafik terendah terjadi pada tahun 2016 dan 2017 dengan rasio capaian produksi pada tahun 2016 sebesar 52,75% dan pada tahun 2017 sebesar 38,21% dari target rendahnya capaian produksi ini disebabkan pada tahun 2016-2017 terjadi kemarau basah sehingga para petambak garam tidak bisa melakukan proses produksi garam secara optimal. karena proses produksi garam sangat tergantung pada cuaca.

Pada Tahun 2018-2020 terjadi produksi garam rakyat mengalami peningkatan dengan rata-rata kenaikan sebesar 4,266% tiap tahunnya (dapat dilihat dari tabel 2.1 pencapaian kinerja palayanan Dinas Kelautan dan Perikanan).

Tabel 2. 2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Lombok Tengah

Uraian *	Anggaran pada Tahun (Rp. 000)					Kabupaten Lombok Tengah										Rata-rata Pertumbuhan (%)	
						Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp. 000)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun (%)						
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Angga ran	Realis asi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pengembangan Perikanan Tangkap	1.178.451	2.224.674	2.356.523	2.731.177	1.645.761	1.168.202	2.106.497	2.259.860	2.657.744	1.623.932	99,13	94,69	95,90	97,31	98,67	17,72	16,58
Pengembangan Budidaya Perikanan	1.915.907	3.862.261	1.846.484	3.289.800	4.189.546	1.883.084	3.812.287	1.740.221	3.063.807	4.084.687	98,29	98,71	94,25	93,13	97,50	38,73	39,37
Optimalisasi Pengelolaan dan pemasaran Produksi Perikanan	836.236	943.043	692.350	701.699	463.946	819.944	927.852	673.086	691.472	440.145	98,05	98,39	97,22	98,54	94,87	11,59	11,98
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	640.011	836.628	567.179	583.705	568.104	503.564	658.272	446.471	478.355	462.210	78,68	78,68	78,72	81,95	81,36	0,31	0,57
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	278.778	266.475	20.000	20.000	16.050	259.345	263.245	20.000	20.000	11.000,0	93,03	98,79	100,00	100,00	68,54	1,95	33,97
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	124.630	50.000	47.700	49.600	38.256	123.228	46.900	46.900	48.593	37.906,0	98,88	93,80	98,32	97,97	99,09	20,84	20,08

Dari tabel 2.2 dapat dilihat bahwa anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah dari tahun 2016 sampai 2020 meningkat, karena didukung oleh anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) yang meningkat. Pada tahun 2020 anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan mengalami penurunan disebabkan karena adanya refocusing akibat pandemic covid 19.

Kinerja anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah dalam kurun waktu 2016 sampai dengan 2020 berdasarkan rata-rata realisasi anggarannya nilai cukup baik (0,90%), akan tetapi jika dilihat dari rata-rata pertumbuhannya ada beberapa program yang mengalami minus pertumbuhan anggarannya antara lain:

- a) program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran Produksi Perikanan yang merupakan program strategis Dinas Kelautan dan Perikanan
- b) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- c) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- d) program peningkatan pengembangan sistim pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Sedangkan program yang mengalami trend positif tiap tahunnya yaitu Program Pengembangan Perikanan Budidaya dan Program Pengembangan Perikanan Tangkap, yang mana ke dua program tersebut merupakan program strategis di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah.

Rasio antara realisasi dan anggaran tiap tahun diatas 85%. Jika dilihat dari masing-masing program, terdapat rasio antara realisasi dan anggaran kurang dari 80%, yaitu pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang mana pada tahun 2016 dan tahun 2017 realisasi anggaran sebesar 78,68% kemudian pada tahun 2018 realisasi anggaran sebesar 78,72%. Rendahnya realisasi anggaran ini, disebabkan oleh tidak terserapnya anggaran untuk kode rekening peyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik khususnya listrik pelabuhan perikanan Teluk Awang, yang mana fasilitas-fasilitas pendukung operasional pelabuhan perikanan Teluk Awang belum di optimalkan pemanfaatannya.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Analisis Renstra K/L dan SKPD Provinsi NTB

Salah satu misi pembangunan nasional yang terkait dengan pembangunan kelautan dan perikanan adalah mewujudkan Indonesia menjadi Negara Maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk membidangi urusan Kelautan dan Perikanan, maka visi KKP-RI ditetapkan selaras dengan visi pembangunan nasional serta bertujuan untuk mendukung terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah **“Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**.

- Mandiri dimaksudkan ke depan Indonesia dapat mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan, sehingga sejajar dan sederajat dengan bangsa lain;
- Maju dimaksudkan dapat mengelola sumber daya kelautan dan perikanan dengan kekuatan SDM kompeten dan iptek yang inovatif dan bernilai tambah, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang tinggi dan merata;
- Kuat diartikan memiliki kemampuan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari pengelolaan potensi sumber daya kelautan dan perikanan dan menumbuhkan wawasan dan budaya bahari;
- Berbasis kepentingan nasional dimaksudkan adalah mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

Dalam Renstra KKP terdapat 4 pilar yang menjadi misi KKP yakni:

1. **“Peningkatan kualitas manusia Indonesia”** melalui peningkatan daya saing sumberdaya manusia Kelautan dan Perikanan dan pengembangan inovasi dan riset kelautan dan perikanan;

2. **“Struktur Ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing** “melalui peningkatan kontribusi ekonomi sector kelautan dan perikanan terhadap perekonomian Nasional.
3. **“Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan** “Melalui Peningkatan kelestarian sumberdaya Kelautan dan Perikanan; dan
4. **“Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya** “melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP

Jika dicermati pada Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP senantiasa memberikan perhatian penuh terhadap stakeholders kelautan dan perikanan, yakni nelayan, pembudidaya ikan, pengolah/pemasar hasil perikanan, petambak garam dan masyarakat kelautan dan perikanan lainnya.

Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang diinginkan dan dapat di capai oleh KKP sebagai suatu hasil dan dampak dari beberapa program yang dilaksanakan. Sasaran Strategi KKP sebagai berikut:

1. Kesejahteraan masyarakat Kelautan dan Perikanan meningkat;
2. Ekonomi sector Kelautan dan Perikanan Meningkat;
3. Sumber daya Kelautan dan Perikanan berkelanjutan;
4. Kapasitas dan Kompetensi SDM Kelautan dan Perikanan Menngkat;
5. Hasil Riset dan Inovasi dimanfaatkan;
6. Tata Kelola Sumberdaya Kelautan dan Perikanan bertanggung jawab;
7. Industrialisasi Kelautan dan Perikanan berdaya saing;
8. Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Integratif;
9. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

Sedangkan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB menetapkan visi **“Membangun Nusa Tenggara Barat yang Gemilang”**. Dalam visi yang diusung terdapat kata kunci **“GEMILANG”** yang bermakna Gerakan Mencintai Lingkungan, Kesehatan dan Pendidikan Cemerlang. Dari kata Gemilang tersebut diharapkan pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi NTB berupa tercapainya masyarakat perikanan dan kelautan Provinsi NTB yang maju dan ditandai dengan meningkatnya pendapatan serta daya beli dengan cara pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan secara arif, bijaksana, efisien dan bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan daya dukung dan kualitas lingkungan sehingga pembangunan dapat berlangsung secara berkelanjutan (*on a sustainable basic*) dan berkeadilan (*equitable basic*).

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB memiliki misi yaitu NTB Sejahtera dan Mandiri melalui penanggulangan kemiskinan, Mengurangi kesenjangan dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi.

Antara visi dan Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Visi Misi Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memiliki keterkaitan yang sangat erat dan selaras dengan visi pembangunan daerah Kabupaten Lombok Tengah yaitu **“Mewujudkan Masyarakat Lombok Tengah yang BERIMAN, SEJAHTERA, BERMUTU, MAJU dan BERBUDAYA (BERSATU JAYA) dengan misi “Pembangunan Ekonomi yang yang berkesinambungan dan berkelanjutan di dukung Infrastruktur berkualitas”**

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Pembangunan kelautan dan perikanan Kabupaten Lombok Tengah selalu mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Tengah yang sudah ditetapkan sebelumnya. Hasil telaahan rencana tata wilayah terhadap kebutuhan pelayanan SKPD disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.4

Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Tengah

No.	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
1	Rencana Pengembangan Sistem Transportasi Laut meliputi Pengembangan Pelabuhan Perikanan Teluk Awang menjadi Pelabuhan Perikanan Nusantara	Telah dibangun pelabuhan perikanan Teluk Awang luas 9 Ha (tanah hasil reklamasi)	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rencana Pengembangan Pelabuhan Perikanan menjadi sentra perikanan terpadu (Industrialisasi Perikanan) untuk pengembangan masih membutuhkan pendanaan sekitar 32 miliar	Kecamatan Pujut dan Kecamatan Praya Timur

Hasil Telaahan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

No.	Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
1	Strategi Pengembangan dan wilayah – wilayah yang berbasis utama pariwisata, pertanian dan perikanan meliputi Pengembangan desa wisata Bahari Desa Mertak	Telah ditetapkan Desa Mertak sebagai Desa Wisata Bahari dan telah mulai disiapkan sarana dan prasarana pendukung	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Mendukung pengembangan pariwisata Daerah	Kecamatan Pujut

Tabel 2.5
Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Tengah

No.	Rencana Pola Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
1. A.	Rencana kawasan budidaya untuk perikanan meliputi : Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya.	1) Konsep pengembangan Perikanan di kembangkan oleh KKP-RI untuk sector perikanan budidaya yaitu pengembangan perikanan berbasis Kawasan	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	1) Pengembangan Produk Unggulan dengan pendekatan Kawasan:	
	- Perikanan Budidaya air tawar terletak di seluruh kecamatan dan diprioritaskan di daerah yg pasokan airnya cukup	2) Pembangunan Lombok Tengah dengan 3 pilar (3 zona pambangunan)		- Kampung Nila	- Kec. Batukliang - Kec. Batukliang Utara - Kec. Kopang - Kec. Jonggat
	- Periknan Budidaya air laut terletak diperairan pantai Kecamatan Praya Barat Daya, Kecamatan Praya Barat, Kec. Pujut, dan Kec. Praya Timur dengan tetap memperhatikan zona kawasan lindung serta zona kawasan pariwisata	3) Pengembangan sektor Kelautan dan Perikanan (Zona I-III) dengan pengembangan produk unggulan dimasing-masing zona		- Kampung Vanamei	- Kec. Praya Timur - Kec. Pujut
		4) Program Unggulan Kabupaten Lombok Tengah periode 2021-2026 yaitu Loteng Sejahtera “Membangun kawasan ekonomi Unggulan di zona aik meneng			
B.	Kawasan Perikanan Tangkap meliputi :		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap		Kecamatan Pujut, Praya Timur , Praya Barat dan Praya Barat Daya
	- Kawasan perikanan tangkap dilaut memanfaatkan potensi perairan di sepanjang pantai kecamatan pesisir (4 Kecamatan)	Pengembangan Kawasam Perikanan Terpadu		Industrialisasi perikanan tangkap	Pelabuhan Perikanan Teluk Awang
	- Kawasan perikanan tangkap di perairan umum yg memanfaatkan potensi waduk, sungai dan embung tersebar di seluruh kecamatan				

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Beberapa permasalahan yang dihadapi berdasarkan tugas dan fungsi dari Bidang Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut:

Tabel. 3.1
Permasalahan berdasarkan Tupoksi Pelayanan

Unit Eselon III	Permasalahan yang dihadapi	Penyebab
Perikanan Tangkap	1. Masih rendahnya Produktifitas Nelayan	a. Armada yang dimiliki oleh nelayan masih tradisional
		b. Masih rendahnya kemampuan nelayan dalam mengoperasikan sarana yang lebih modern
		c. Terbatasnya Modal Usaha yang dimiliki oleh nelayan
	2. Belum terlaksananya Kegiatan Pelelangan Ikan di TPI	a. Sarana dan Prasarana Tempat Pelelangan Ikan (TPI) belum memenuhi standar
		b. Terbatasnya SDM pengelola TPI baik secara kualitas maupun kuantitas
Pengelolaan Perikanan Budidaya	1. Masih Rendahnya Produktivitas Pembudidaya ikan	a. Ketersediaan benih ikan, Calon Induk Ikan dan Induk Ikan yang berkualitas/Bermutu masih terbatas
		b. Sarana dan prasarana budidaya yang memenuhi persyaratan teknis masih kurang
		c. Serangan Hama dan penyakit ikan
		2. Belum optimalnya Pengelolaan BBI dan Dempond tambak
		a. Sarana dan prasarana Balai Benih Ikan (BBI) dan dempond tambak belum memadai

		b. Terbatasnya SDM pengelola BBI dan dempond tambak baik secara kualitas maupun kuantitas
Pemasaran dan Pengolahan Hasil Kelautan dan perikanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Terbatasnya kualitas dan kuantitas produk olahan hasil perikanan b. Tingkat konsumsi ikan masih rendah c. Kuantitas dan Kualitas garam rakyat masih rendah 	<ul style="list-style-type: none"> a. Terbatasnya SDM dan penguasaan teknologi produk olahan hasil perikanan b. Tata niaga pemasaran hasil perikanan belum dikelola dengan baik c. Sarana dan prasarana pengolahan garam masih kurang

Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 -2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah tahap ke-Tiga dalam dokumen RPJPD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2031. Dengan mempertimbangkan visi, misi, sasaran pokok dan tahapan pembangunan jangka panjang daerah, potensi, permasalahan, isu strategis, peluang dan tantangan pembangunan, serta visi, misi dan arah pembangunan jangka menengah Kabupaten, maka dirumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021 -2026 sebagaimana diuraikan berikut:

a. Visi

Visi dan misi pembangunan yang diusung oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 – 2026 adalah: ***“Terwujudnya Masyarakat Lombok Tengah yang Beriman, Sejahtera dan Bermutu, Maju dan Berbudaya”***

Makna dari visi tersebut adalah:

- 1) **Beriman** merupakan gambaran utuh jiwa *Akhlaqul Karimah* masyarakat Lombok Tengah sebagai dasar dari seluruh aktifitas kehidupan yang dijalani masyarakat;
- 2) **Sejahtera** menggambarkan Masyarakat Lombok Tengah yang terpenuhi segala kebutuhan dasarnya dengan cara yang mudah
- 3) **Bermutu** merupakan kehendak bersama untuk mencapai Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki kapasitas yang berstandar internasional;

- 4) **Maju** memuat tekad untuk menjadi barometer kemajuan daerah di tingkat regional maupun nasional dengan memanfaatkan keunggulan komparatif;
- 5) **Berbudaya** dimaksudkan sebagai prinsip utama dalam mengoptimalkan potensi dan identitas local berskalanasional/internasional (*The Heart of Lombok*).

yang terangkai dalam akronim “BERSATU JAYA” dengan makna Masyarakat Lombok Tengah Bersatu padu untuk mencapai Kejayaan.

b. Misi

Visi Pembangunan Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021-2026 tersebut di wujudkan melalui 5 misi pembangunan sebagai berikut:

- ✚ Merawat Akhlaqul Karimah dalam Kehidupan Bermasyarakat;
Bermakna terwujud nya masyarakat yang bersandar pada nilai agama melalui peningkatan kualitas akhlak serta kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini diharapkan dapat mewujudkan masyarakat yang harmonis antar umat, moderasi beragama dan menekan kasus penyalahgunaan narkoba
- ✚ Mencapai Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Mandiri dan Unggul
Sumberdaya manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup serta mampu bersaing dalam kancah nasional dan global. Penguatan sumberdaya manusia ini ditopang dalam dua aspek yaitu pendidikan dan kesehatan. Pada aspek pendidikan, sumberdaya manusia di arahkan untuk menjadi sumberdaya manusia yang memiliki kecerdasan dengan terbukanya kesempatan mengenyam pendidikan setinggi mungkin untuk semua orang. Dalam aspek kesehatan, sumberdaya manusia yang unggul dapat di gambarkan dengan tingginya derajat kesehatan yang diharapkan dapat terwujud untuk membentuk sumberdaya manusia yang mandiri.
- ✚ Pelayanan Umum Pemerintahan yang Mudah, Cepat dan Bersih;
Mewujudkan birokrasi yang profesional dan akuntabel serta menghadirkan pelayanan public kemasyarakat yang efektif dan efisien.
- ✚ Pembangunan Ekonomi yang Berkeseimbangan dan Berkelanjutan didukung Infrastruktur Berkualitas.
Terwujudnya pertumbuhan dan penguatan struktur ekonomi berbasis sector unggulan dengan memperhatikan keseimbangan dan pemerataan antar wilayah.
- ✚ Melestarikan dan Mengembangkan Nilai-nilai Budaya Luhur.
Terwujudnya masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya warisan luhur daerah dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam rangka mewujudkan visi untuk membangun Kabupaten Lombok Tengah yang **Bersatu Jaya**, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah memiliki relevansi untuk mendukung pencapaian misi Keempat pembangunan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 - 2026 yaitu Pembangunan Ekonomi yang Berkesinambungan dan Berkelanjutan didukung Infrastruktur Berkualitas melalui Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

Telaahan Renstra Kementerian / Lembaga dan Renstra

Salah satu misi pembangunan nasional yang terkait dengan pembangunan kelautan dan perikanan adalah Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Maritim yang Mandiri, Maju, Kuat dan Berbasis Kepentingan Nasional. Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk membidangi urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP ditetapkan selaras dengan visi pembangunan nasional serta bertujuan untuk mendukung terwujudnya Indonesia sebagai poros maritime dunia.

Visi KKP adalah “*Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang berdaulat dan berkelanjutan, serta masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera dalam rangka mendukung Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.*”. Visi dan misi Kementerian tersebut memiliki keterkaitan yang sangat erat dan selaras dengan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Lombok Tengah yaitu: untuk mewujudkan “Lombok Tengah Bersatu Jaya”.

Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Permen KP nomor: 17/Permen-KP /2020 tentang Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2019 – 2024, telah merumuskan sasaran, strategi dan arah kebijakan yang mendukung pembangunan sector kelautan dan perikanan diProvinsi NTB dan Kabupaten Lombok Tengah. Dukungan pembangunan kelautan dan perikanan tersebut dilaksanakan melalui dana Alokasi Khusus (DAK), dengan sasaran sebagai berikut:

Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan
berdasarkan sasaran renstra K/L beserta faktor penghambat
dan pendorong keberhaslilan penanganannya.

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan meningkat	Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Masih Rendah	- Tingkat produktivitas masyarakat kelautan dan perikanan masih rendah	- Potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang cukup besar
			- Kurangnya akses permodalan ke lembaga keuangan	- Jumlah Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (Pembudidaya Ikan, Nelayan, Pengolah, pemasar dan petambak garam) cukup banyak
			- Penguasaan teknologi kelautan Kualitas dan kuantitas sarana prasarana kelautan dan perikanan masih kurang memadai dan perikanan masyarakat perikanan masih rendah	- Fasilitas Akses Permodalan bagi Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan dengan Lembaga Keuangan
2.	Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan meningkat	Kualitas mutu produk perikanan masih rendah	- Penguasaan Teknik Penanganan Pasca Panen Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Masih Rendah	- Adanya program pemberdayaan masyarakat perikanan dan kelautan
3.	Industrialisasi Kelautan dan Perikanan berdaya saing	Produksi kelautan dan perikanan masih rendah	- Kualitas dan Kuantitas Sarana, Prasarana kelautan dan perikanan masih kurang memadai	- Teknologi dan inovasi perikanan dan kelautan yang semakin berkembang
4.	Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan meningkat	Tingkat Konsumsi Ikan Masih Rendah	- Diversifikasi Produk Perikanan	- Dukungan Pemerintah pada sub sektor Kelautan dan Perikanan semaiKn besar
				- Program dan Kegiatan untuk penguatan sarana dan prasarana perikanan
				- Pelaksanaan Sosialisasi Gemar Makan Ikan

Tabel 3.3.
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Berdasarkan Sasaran
Renstra Perangkat Daerah Provinsi Beserta Faktor Penghambat dan
Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya produksi Perikanan	Masih rendahnya produktivitas Pembudidaya Ikan	<ul style="list-style-type: none"> - Sarana dan prasarana pendukung Produksi belum memadai - Penguasaan teknologi Kelautan dan Perikanan masih kurang - Tingginya Harga Pakan Ikan - Ketersediaan benih unggul dan bermutu terbatas - Lemahnya akses permodalan bagi usaha menengah, mikro dan kecil sektor kelautan dan perikanan - Infrastruktur pendukung pembangunan Kelautan dan Perikanan belum memadai 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan Program dan Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan - Sosialisasi dan Penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik dan Cara Pembenihan Ikan yang Baik - Dukungan Program Penyediaan Pakan Mandiri - Penguatan Fungsi Balai Benih Ikan - Peningkatan Kemampuan UPR - Fasilitasi Pelaku Usaha (Pembudidaya Ikan) dengan Lembaga Keuangan/ Perbankan untuk Akses Permodalan - Memfasilitasi penyediaan aset yang dapat didayagunakan sebagai jaminan untuk memperoleh modal usaha - Dukungan Pelaksanaan Program Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Pembangunan Kelautan dan Perikanan

					<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi antar Perangkat Daerah/ Kementerian dan Lembaga - Koordinasi Lintas Sektor - Rencana Zonasi Tata Ruang dan Pola Ruang - Modernisasi Sarana Penangkapan Ikan - Sertifikasi bagi Awak Kapal - Perlindungan Nelayan (Fasilitasi Jaminan Sosial bagi Nelayan) - Program Kegiatan yang mendukung penyediaan Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan - Fasilitasi Pelaku Usaha (Nelayan) dengan Lembaga Keuangan/Perbankan untuk Akses Permodalan - Memfasilitasi penyediaan aset yang dapat didayagunakan sebagai jaminan untuk memperoleh modal usaha
		Masih Rendahnya Produktivitas Nelayan	<ul style="list-style-type: none"> - Terjadi Konflik penggunaan Ruang - Jangkauan penangkapan ikan masih terbatas - Terbatasnya sarana dan prasarana penangkapan ikan - Terbatasnya Modal Usaha 		<ul style="list-style-type: none"> - Pembukaan Lahan Baru untuk Tambak Garam - Fasilitasi Koperasi /Kelompok Usaha garam dengan Instansi/ Lembaga yang menangani Sertifikasi - Peningkatan Kapasitas Petambak Garam
		Masih Rendahnya Produktivitas Petambak Garam	<ul style="list-style-type: none"> - Alih Fungsi Lahan dari Tambak Garam Menjadi Tambak Udang - Belum Tersertifikasinya Produk Garam Rakyat 		

		Masih Rendahnya Produktivitas Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> - Lemahnya akses permodalan bagi usaha menengah, mikro dan kecil sektor kelautan dan perikanan - Produk Olahan Perikanan Masih Belum Tersertifikasi - Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Yang dimiliki masih Terbatas 	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi Pelaku Usaha (Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan) dengan Lembaga Keuangan/Perbankan untuk Akses Permodalan - Fasilitasi Koperasi /Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan dengan Instansi/Lembaga yang menangani Sertifikasi - Peningkatan Kapasitas Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan - Dukungan Program Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
2	Meningkatnya Konsumsi Ikan Masyarakat	Tingkat Konsumsi Ikan masih rendah	<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya makan ikan untuk meningkatkan nilai gizi keluarga yang masih rendah. 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya dukungan dana untuk kegiatan sosialisasi GEMARIKAN, lomba masak ikan, bazaar produk hasil perikanan dan sebagainya

Melalui Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah dalam proses penyusunannya telah mempertimbangkan penyelarasan dan harmonisasi substansi urusan dan sub urusan dengan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan, juga dengan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi NTB dan renstra Kabupaten Lombok Tengah, sehingga dalam implementasi program dan kegiatan antara Pusat dan provinsi serta kabupaten dapat berjalan secara sinergis.

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Di tinjau dari Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Faktor –faktor Penghambat dan Pendorong dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah disajikan pada table 3.4 berikut:

Tabel 3.4.
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.

No	Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Pengembangan Pelabuhan Perikanan Teluk Awang di Kecamatan Pujut	Status Pelabuhan Perikanan Masih Pelabuhan Perintis	<ul style="list-style-type: none"> - Belum Terbentuknya UPT KKP pengelola Pelabuhan Perikanan Teluk Awang - Sarana dan Prasarana pendukung operasional Pelabuhan masih kurang 	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Rekomendasi Bupati Lombok Tengah tentang Rekomendasi untuk UPT KKP (Pelabuhan Perikanan Teluk Awang) - Sudah ada Personil yang ditempatkan di Pelabuhan Perikanan Teluk Awang dengan jabatan sebagai penanggungjawab dan Bagian Administrasi - Aktivitas Pendaratan Ikan sudah terlaksana
2.	Pengembangan Desa wisata Bahari Mertak	Promosi tentang Dewi Bahari masih kurang	<ul style="list-style-type: none"> - Akses Jalan menuju Lokasi Dewi Bahari masih kurang memadai 	<ul style="list-style-type: none"> - Sudah ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai Dewi Bahari dan telah dialokasikan anggaran untuk penyediaan sarana dan prasarana

3.	Pengembangan Produk Unggulan Berbasis Kawasan	Produktivitas Pelaku Usaha di Kawasan Pengembangan Perikanan Masih Rendah	<ul style="list-style-type: none"> - Budidaya Udang Vanamei merupakan usaha padat modal - Harga jual produk perikanan (ikan air tawar) masih rendah di tingkat pembudidaya ikan 	<ul style="list-style-type: none"> - Sudah ada aktivitas budidaya udang dengan system tradisional dan semi intensif - Jumlah Pembudidaya yang cukup banyak.
----	---	---	---	---

Penentuan Isu – isu Strategis

Pelaksanaan pembangunan perikanan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2016-2021 dapat memberikan manfaat maupun dampak positif yang bisa dirasakan namun tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan ataupun kendala yang dihadapi.

Berdasarkan identifikasi permasalahan terhadap hasil pembangunan periode sebelumnya dan telaahan visi dan misi Pemerintah Daerah serta analisis lingkungan strategis maka isu - isu strategis dalam pembangunan kelautan dan perikanan adalah:

- a. Pengelolaan Potensi Sumberdaya kelautan dan perikanan belum dikelola secara optimal;
- b. Sarana Prasarana Pendukung Produksi masih belum memadai;
- c. Penguasaan Teknologi Kelautan dan Perikanan Masih Kurang
- d. Tingginya harga pakan dan terbatasnya ketersediaan benih unggul dan bermutu tinggi dalam pengembangan perikanan budidaya;
- e. Terbatasnya jumlah dan kualitas tenaga teknis perikanan dan penyuluh perikanan
- f. Lemahnya akses permodalan bagi usaha menengah, kecil dan mikro sector Kelautan dan Perikanan
- g. Pendapatan Perkapita Masyarakat Kelautan dan Perikanan masih rendah
- h. Infrastruktur Pendukung pembangunan kelautan dan perikanan belum memadai
- i. Konflik penggunaan ruang

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan jangka menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai atau diwujudkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, yang dirumuskan dengan memperhatikan dukungan terhadap visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta dilengkapi dengan alat ukur/indikator untuk mengetahui tingkat keberhasilannya yang akan di pertanggungjawabkan pada akhir periode perencanaan. Sasaran jangka menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah dirumuskan dengan memperhatikan tugas dan fungsi, kelompok sasaran yang dilayani, tujuan organisasi, permasalahan dan isu – isu strategis pembangunan daerah. Berdasarkan analisis permasalahan dan isu strategis pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang cukup kompleks dan dinamis maka diperlukan langkah – langkah efektif melalui formulasi penyusunan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan yaitu: Meningkatnya Kontribusi Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB, yang dilaksanakan melalui sasaran:

- 1) Meningkatnya produktivitas perikanan Tangkap, dengan indikator Persentase Laju pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap, dan Nilai Tukar Nelayan (%)
- 2) Meningkatnya Produktivitas Perikanan Budidaya, dengan indikator Persentase Laju pertumbuhan produksi perikanan budidaya (%), dan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (%).
- 3) Meningkatnya Produktivitas Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, dengan indikator Persentase Laju Pertumbuhan Produksi Pengolahan Hasil Perikanan (%), dan Tingkat Konsumsi Ikan Masyarakat (Kg/Kapita/thn)

Tujuan dan sasaran beserta indikatornya sebagaimana tersaji pada table 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke-					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Kontribusi Kelautan dan Perikanan		Meningkatnya Kontribusi PDRB Sektor Perikanan (%)	2.98	3.09	3.21	3.33	3.44	3.56
	Meningkatnya Produktifitas Perikanan Tangkap	Persentase Laju pertumbuhan produksi Perikanan tangkap (%)	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
		NTN (%)	102.96	103.95	104.96	105.97	106.99	108.02
	Meningkatnya Produktifitas Perikanan Budidaya	Persentase Laju pertumbuhan produksi perikanan Budidaya (%)	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10
		NTPi (%)	100.92	101.87	102.82	103.77	104.72	105.67
	Meningkatnya Produktifitas Pengolahan Hasil Perikanan	Persentase Laju pertumbuhan produksi Pengolahan Hasil Perikanan (%)	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
		TK. Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Thn)	34.39	36.10	37.34	39.05	40.83	42.97

Hubungan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah mengambil sasaran dari RPJMD Kabupaten Lombok Tengah untuk menjadi tujuan pembangunan kelautan dan perikanan dalam rangka mewujudkan pemenuhan pencapaian misi Ke-Empat pembangunan Kabupaten Lombok Tengah yaitu Pembangunan Ekonomi yang Berkesinambungan dan Berkelanjutan didukung Infrastruktur Berkualitas melalui Terwujudnya pertumbuhan dan penguatan struktur ekonomi berbasis sektor unggulan dengan memperhatikan keseimbangan dan pemerataan antar wilayah, Sehingga tujuan pembangunan sektor kelautan dan perikanan yaitu Meningkatnya kontribusi sektor kelautan dan perikanan dapat mendukung pencapaian targe tujuan RPJMD meliputi: sasaran Meningkat nya nilai tambah produk unggulan dan ekonomi kreatif, dengan indicator sasaran Laju pertumbuhan PDRB sector pertanian, kehutanan dan perikanan(%)..

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mempercepat implementasi dan konsistensi visi, misi, tujuan dan sasaran dalam proses pembangunan daerah, perlu dikembangkan strategi dan arah kebijakan sehingga dinamika pembangunan tetap terarah, terpadu dan berkesinambungan.

Strategi adalah pemikiran-pemikiran secara konseptual analitis dan komprehensif tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk memperlancar atau memperkuat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk mengarahkan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun dan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya, diperlukan pedoman berupa arah kebijakan.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021 – 2026 secara efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategi tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Arah kebijakan yang sudah dirumuskan menjadi sebuah pedoman dimaksudkan untuk mengarahkan strategi dan implementasi pembangunan agar lebih sinergi dan berkesinambungan dalam mencapai target sasaran selama periode 5 (lima) tahun, dengan demikian diharapkan memberikan output hasil pembangunan yang lebih optimal. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pada pelaksanaannya.

Sesuai dengan arah dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah melaksanakan amanah yang tercantum pada Misi Keempat. Kaitan antara visi dan misi Pembangunan Kabupaten Lombok Tengah dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan dapat dilihat pada table 5.1. berikut ini:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi :“ Mewujudkan Masyarakat Lombok Tengah yang BERIMAN, SEJAHTERA, BERMUTU, MAJU dan BERBUDAYA (BERSATU JAYA) “			
Misi IV: Pembangunan Ekonomi yang Berkesinambungan dan Berkelanjutan didukung Infrastruktur Berkualitas			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kontribusi Kelautan dan Perikanan pada PDRB	1.Meningkatnya produktifitas Perikanan tangkap	1. Pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap, Fasilitasi Sarana dan prasarana produksi, memperkuat kapasitas kelembagaan nelayan dan optimalisasi fungsi Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penertiban Surat Tanda Daftar Kapal Perikanan < 5 GT 2. Pengembangan Sarana dan Prasarana penangkapan ikan 3. Perlindungan dan pemberdayaan kelompok nelayan melalui program asuransi nelayan dan pendampingan akses permodalan bagi nelayan. 4. Pembinaan dan pengembangan usaha nelayan/kelompok dan penguatan sistim informasi nelayan kecil

			5. Pengembangan Tempat Pelelangan Ikan
	2. Meningkatnya Produktifitas Perikanan Budidaya	1. Pengelolaan sumberdaya perikanan budidaya, Fasilitasi Sarana dan prasarana produksi, memperkuat kapasitas kelembagaan Budidaya dan optimalisasi fungsi UPTD budidaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi Pemanfaatan potensi sumberdaya Perikanan Budidaya Laut, air payau dan Air Tawar 2. Penyediaan sarana dan prasarana Budidaya Perikanan, 3. Penguatan Kapasitas Kelembagaan usaha budidaya dan Fasilitasi kemitraan pelaku usaha budidaya 4. Meningkatkan peran UPTD perikanan budidaya (BBI dan dempond tambak) sebagai pusat produksi, distribusi dan pengembangan teknologi perikanan budidaya. 5. Fasilitasi CBIB, CPIB dan SehatKan
	3. Meningkatnya Produktifitas Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	1. Penguatan dan pengembangan Produk perikanan melalui peningkatan kualitas mutu, nilai tambah, daya saing, dan keamanan produk hasil perikanan serta Fasilitasi akses pemasaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan Kapasitas dan produktifitas Poklhasra dan KUGAR; 2. Fasilitasi perizinan, akses pasar, promosi produk, peningkatan standarisasi dan keamanan produk.

			3. Pengembangan Unit Pengolahan ikan (UPI), sarana pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan 4. Pemantauan dan pengujian mutu produk hasil perikanan 5. Pelaksanaan Kampanye Gemarikan
--	--	--	--

Selain focus kepada tujuan dan sasaran yang telah diarahkan pada dokumen RPJMD, hal penting yang perlu diakomodir pada strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan adalah adanya kebijakan yang bersifat lintas sektor dimana sektor kelautan dan perikanan perlu memberikan dukungan dan kontribusi dalam capaian sasaran RPJMD pada sektor lain antara lain:

- 1) Isu gender, dimana “Pengarusutamaan Gender adalah cross cutting issue atau isu lintas sektoral, artinya tanggung jawab pelaksanaannya bukan hanya diemban oleh dinas pemberdayaan perempuan dan anak di daerah, tapi oleh dinas lain di daerah. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan telah diarahkan pada kegiatan yang melibatkan semua pihak secara gender, usia dan strata. Dinas Kelautan dan Perikanan melaksanakan Kegiatan Gemarikan sebagai salah satu kegiatan yang responsif gender;
- 2) Pengembangan Produk Unggulan Perikanan berbasis Kawasan (Kampung Nila), Mengacu pada kondisi yang ada saat ini, dengan melihat potensi yang dimiliki dan proyeksi kedepan maka target pengembangan sektor kelautan dan perikanan untuk 5 (lima) tahun kedepan yaitu pengembangan budidaya ikan air tawar dengan komoditi utama ikan nila dimana Kepala Daerah terpilih mencanangkan Program Unggulan Kab. Lombok Tengah Periode 2021-2026 yaitu Loteng Sejahtera “Membangun Kawasan Ekonomi Unggulan di Zona Aiq Meneng. sebagaimana dituangkan dalam misi ke-empat dokumen RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 – 2026 dan merupakan salah satu program unggulan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah yang mendukung program unggulan ini.
- 3) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Juga selain melaksanakan kampung nila juga melaksanakan program asuransi nelayan maiq meres yg mana program tersebut juga termasuk dalam program Unggulan kepala daerah terpilih pada Loteng Sejahtera

yaitu asuransi petani dan nelayan. sebagaimana dituangkan dalam misi ke-empat dokumen RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 – 2026

4) Pengembangan kawasan Perikanan Terpadu melalui Industrialisasi Perikanan Tangkap.

Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemanfaatan alam serta pemberdayaan masyarakat, pengembangan kawasan pertumbuhan ekonomi berbasis perikanan yang terintegrasi merupakan suatu hal yang harus dilakukan. Konsep pembangunan kawasan ekonomi tersebut dijadikan sebagai embrio kawasan industrialisasi perikanan dari hulu sampai hilir yang meliputi produksi, pengolahan dan pemasaran.

Konsep pengembangan perikanan terpadu berdasarkan prinsip terintegrasi, efisiensi dan akselerasi. Pengembangan kawasan perikanan terpadu ini merupakan bagian dari pengembangan industri perikanan yang langsung berada di wilayah pesisir. Kondisi ini diharapkan mampu memotong rantai pemasaran yang panjang antara penjual dan konsumen.

Sebagai embrio dari industrialisasi perikanan, pengembangan kawasan pertumbuhan ekonomi berbasis perikanan akan mendorong terwujudnya sinergi lintas sektoral dalam pengembangan suatu wilayah. Kawasan yang memiliki potensi ekonomi berbasis perikanan, dikembangkan dengan melakukan sinergi dan kerjasama dengan kementerian atau lembaga pemerintahan lain.

Industri perikanan merupakan strategi untuk menggerakkan seluruh potensi perikanan, melalui pengembangan perikanan budidaya, perikanan tangkap sebagai industri hulu dan pengolahan hasil produk kelautan dan perikanan sebagai industri hilir. Industrialisasi perikanan dilakukan melalui pengembangan komoditi unggulan untuk meningkatkan nilai tambah produk secara menyeluruh, mulai hulu sampai hilir sehingga diharapkan akan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Keberadaan pelabuhan perikanan teluk Awang sangat mendukung untuk pengembangan kawasan perikanan terpadu dengan sector hulu perikanan tangkap sebagai pendukung utama selain itu dalam kawasan pelabuhan perikanan juga dikembangkan sector hilir yaitu industri pengolahan ikan dan industri perkapalan untuk mendukung sector perikanan tangkap. Selain perikanan tangkap yang menjadi sector hulu sector perikanan budidaya juga sebagai pendukung karena pada daerah hinterland pelabuhan perikanan teluk Awang banyak aktivitas perikanan budidaya baik payau maupun laut sehingga hulu dan hilirnya lengkap dalam satu kawasan.

Selain itu dalam rangka mendukung agenda pembangunan daerah pada dokumen RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 – 2026, telah disusun program unggulan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah yang dinilai strategis untuk mendukung kebijakan Pemerintah daerah dalam rangka Peningkatan kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB Kabupaten Lombok Tengah, sebagai berikut:

No.	Program Unggulan	Manfaat Proyek	Indikasi Pendanaan	OPD Pendukung
1.	Kampung Nila	Meningkatnya produksi Dan produktivitas usaha Budidaya air tawar dengan komoditas Nila	APBD dan APBN	Diskop dan UKM Disperindag Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Lembaga keuangan/Perbankan
2.	Kampung Vanamei	Meningkatnya produksi Dan produktivitas usaha Budidaya air Payau dengan komoditas Udang Vanamei	APBD dan APBN	Diskop dan UKM Disperindag Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Lembaga keuangan/Perbankan
3.	Asuransi Nelayan Maiq Meres	Memberikan perlindungan bagi individu nelayan dalam rangka keberlangsungan kegiatan usaha penangkapan ikan	APBD	Kementerian Kelautan dan Perikanan Perusahaan jasa asuransi
4	Industrialisasi Perikanan Tangkap	Mendukung pengembangan Kawasan perikanan terpadu (Pelabuhan Perikanan Awang)	APBN dan APBD	Kementerian Kelautan dan Perikanan Dishub Diskop dan UKM Disperindag Polairud

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan

Dalam rangka mendukung capaian misi ke-empat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 – 2026, sebagaimana rumusan strategi dan arah kebijakan yang telah dirumuskan akan diimplementasikan dalam program urusan wajib dan urusan pilihan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan berdasarkan Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dan di tegaskan oleh surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor. 130 / 763 / SJ Tanggal 27 Januari 2020 perihal percepatan implementasi sistem informasi pemerintahan daerah. Untuk periode Renstra Dinas Tahun 2021 s/d 2026. Secara garis besar Program dan Kegiatan adalah sebagai berikut:

A. Program Urusan Wajib

1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan dan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini diarahkan untuk fasilitasi aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran melalui peningkatan sarana dan prasarana aparatur dalam rangka mencapai akuntabilitas perencanaan dan pelaporan SKPD

Program tersebut diwujudkan dalam kegiatan:

- ✚ Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- ✚ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- ✚ Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah
- ✚ Administrasi Umum Perangkat Daerah
- ✚ Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- ✚ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- ✚ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

B. Program Urusan Pilihan

1 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program ini diarahkan untuk pengembangan usaha perikanan tangkap guna peningkatan produksi perikanan dari hasil penangkapan ikan, baik di perairan laut maupun perairan umum daratan.

Program tersebut diwujudkan dalam kegiatan:

- ✚ Pengelolaan Penangkapan Ikan di wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan air Lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 daerah Kabupaten/Kota
- ✚ Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota
- ✚ Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 daerah kabupaten/kota
- ✚ Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

2 Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Program ini diarahkan untuk pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di kawasan Perairan Umum Daratan guna mendukung terwujudnya pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

Program tersebut diwujudkan dalam kegiatan:

- ✚ Pengawasan Sumberdaya Perikanan di wilayah Sungai Danau, Waduk, Rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota

3 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program ini diarahkan untuk meningkatkan produksi perikanan dari hasil budidaya ikan dan produksi benih ikan air tawar serta untuk mewujudkan kawasan perikanan unggulan.

Program tersebut diwujudkan dalam kegiatan:

- ✚ Penerbitan Ijin Usaha Perikanan di bidang pembudidayaan ikan
- ✚ Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil
- ✚ Penerbitan Tanda Daftar bagi pembudidaya ikan kecil (TDPIK) dalam 1 daerah Kabupaten/Kota
- ✚ Pengelolaan Pembudidaya Ikan

4 Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan

Program ini di arahkan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produk olahan hasil perikanan.

Program tersebut diwujudkan dalam kegiatan:

- ✚ Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil
- ✚ Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
- ✚ Penyediaan dan penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Kerangka Pendanaan Indikatif berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019

Rencana program dan kegiatan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah yang dilaksanakan berdasarkan Permendagri No.90 tahun 2019 untuk periode Tahun 2021 s/d 2026 sebanyak: 1 program penunjang penyelenggaraan pemerintah dan 3 Program strategis/teknis, dengan 7 kegiatan penunjang, dan 1 kegiatan teknis dengan 52 sub kegiatan, sebagaimana table 6.1. berikut:

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Rencana Pendanaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/SubKegiatan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangka t Daerah (2026)	Perangka t Daerah Penang ungjawa b	Lokasi
					2021		2022		2023		2024		2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatnya Kontribusi Kelautan dan Perikanan pada PDRB			Persentase Kotribusi PDRB Sektor Perikanan (%)	2,93	3.06		3.21		3.36		3.52		3.68		3.85		3.85		
Meningkatkan Produktivitas Perikanan Tangkap			Persentase Laju Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap (%)	2.10	2.50		2.50		2.50		2.50		2.50		2.50				
			Nilai Tukar Nelayan (NTN) (%)		102.96		103.95		104.96		105.97		106.99		108.02				
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	3,039.30	3,115.28	2,356,338,213	3,193.16	3,553,967,276	3,272.99	3,968,460,907	3,354.82	4,564,729,928	3,438.69	5,129,863,450	3,524.66	5,652,748,427	3,524.66	Dislutkan	Loteng
		Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan diwilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan air Lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan yg tersedia (Unit/Paket)	26.00	85.00	2,072,773,298	104.00	3,006,649,276	112.00	3,287,949,907	119.00	3,825,081,128	126.00	4,309,505,070	136.00	4,766,380,709	682	Dislutkan	Loteng
	1.00	Penyediaan Data dan Informasi Sumberdaya Ikan	Jumlah Publikasi Data Statistik Perikanan Tangkap (Dokumen)	12.00	12.00	22,839,300	12.00	40,062,500	12.00	42,065,625	12.00	44,168,906	12.00	46,377,352	12.00	48,696,219	12.00	Dislutkan	Loteng
	2.00	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Perikanan Tangkap yg Tersedia (Unit/Paket)	8.00	26.00	416,826,398	28.00	432,180,000	30.00	463,050,000	32.00	592,704,000	34.00	734,706,000	36.00	911,282,400	186.00	Dislutkan	Loteng



	3.00	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah sarana Usaha Perikanan Tangkap (Unit/Paket)	18.00	59.00	1,633,107,600	76.00	2,534,406,776	82.00	2,782,834,282	87.00	3,188,208,222	92.00	3,528,421,718	100.00	3,806,402,090	496.00	Dislutkan	Loteng
		Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kelas Kelompok KUB (Kelompok)	24.00	41.00	190,983,605	56.00	347,850,000	71.00	387,091,000	84.00	416,828,800	97.00	456,066,380	112.00	497,503,718	461.00	Dislutkan	Loteng
			Penumbuhan Kelompok Usaha Nelayan (KUB) Baru	10.00	10.00		14.00		16.00		20.00		24.00		26.00	110.00			
	1	Pengembangan Kapasitas Nelayan	Peningkatan Kapasitas Nelayan (Kelompok)	0.00	16.00	105,379,557	20.00	237,000,000	25.00	252,813,000	30.00	262,163,000	35.00	280,693,000	40.00	301,071,000	166.00	Dislutkan	Loteng
	2	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Penguatan Kelembagaan Nelayan (Kelompok)	20.00	20.00	85,604,048	25.00	100,140,000	30.00	117,898,000	34.00	132,615,800	38.00	147,653,380	43.00	163,042,718	190.00	Dislutkan	Loteng
	3	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan dan Kemitraan Usaha	Kelompok Nelayan/Nelayan mendapat akses permodalan	4.00	5.00	0	11.00	10,710,000	16.00	16,380,000	20.00	22,050,000	24.00	27,720,000	29.00	33,390,000	105.00	Dislutkan	Loteng
		Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT diwilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 daerah kabupaten/kota	Jumlah Kapal Perikanan ukuran sampai ukuran 10 GT yang terdaftar (Unit)	2.00	0.00	0	448.00	31,840,000	504.00	35,820,000	560.00	39,800,000	616.00	43,780,000	672.00	47,760,000	2,800.00	Dislutkan	Loteng
	1.00	Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Bukti pendaftaran Kapal Perikanan (BPKP) berukuran sampai dengan 10 GT (Dokumen)	2.00	0.00	0	448.00	31,840,000	504.00	35,820,000	560.00	39,800,000	616.00	43,780,000	672.00	47,760,000	2,800.00	Dislutkan	Loteng
		Kegiatan Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Ikan yang dilelang (Ton)	0.00	629.50	92,581,310	642.10	167,628,000	740.20	257,600,000	838.30	283,020,000	936.42	320,512,000	1,034.50	341,104,000	4,821.02	Dislutkan	Loteng
	1	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah sarana Pendukung TPI (Paket)	4.00	4.00	92,581,310	4.00	167,628,000	7.00	257,600,000	7.00	283,020,000	7.00	320,512,000	7.00	341,104,000	36.00	Dislutkan	Loteng

		Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Persentase Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap dan Budidaya yang ditangani (%)	0.00	0.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00	13,200,000	100.00	14,520,000	100.00	15,840,000	100.00	Dislutkan	Loteng
		Pengawasan Sumberdaya Perikanan diwilayah Sungai , Danau, Waduk, Rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan PUD yang diawasi (Lokasi)	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	2.00	13,200,000	2.00	14,520,000	2.00	15,840,000	2.00	Dislutkan	Loteng
		Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap diwilayah sungai, Danau, Waduk, Waduk, Rawa, dan Genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Operasional pengawasan di waduk Pengga dan Batujai (Kali)	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	12.00	13,200,000	12.00	14,520,000	12.00	15,840,000	12.00	Dislutkan	Loteng
	Meningkatkan Produktivitas Perikanan Budidaya		Persentase Laju Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya (%)	2.00	2.10		2.10		2.10		2.10		2.10		2.10				
			Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) (%)	99.97	100.92		101.87		102.82		103.77		104.72		105.67				
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	42,409.90	43,300.51	2,845,498,065	44,209.82	4,389,021,726	45,138.22	4,918,805,765	46,086.13	5,163,370,693	47,053.94	5,735,801,144	48,042.07	6,365,276,671	48,042.07	Dislutkan	Loteng
			Produksi Benih (ekor)	7,100,000	7,462,100		7,842,667		8,242,643		8,623,210		9,003,777		9,384,344		9,384,344	Dislutkan	Loteng
		Kegiatan Penerbitan Ijin Usaha Perikanan di bidang pembudidayaan ikan	Jumlah Rekomendasi Dokumen Pelayanan Perijinan Perikanan Budidaya (Dokumen)	0.00	0.00	0	3.00	35,000,000	5.00	60,000,000	7.00	90,000,000	9.00	115,000,000	11.00	140,000,000	35.00	Dislutkan	Loteng

1	Penetapan dan prosedur Penerbitan ijin usaha , lokasi dan /atau manfaat atau dampak negatifnya dalam satu daerah kabupaten/kota yang menggunakan teknologi sederhana, semi intensif dan intensif serta tidak menggunakan modal asing dan /atau tenaga kerja asing	Jumlah SOP Perijinan Perikanan Budidaya (Dokumen)	0.00	0.00	0	1.00	15,000,000	1.00	20,000,000	1.00	30,000,000	1.00	35,000,000	1.00	40,000,000	1.00	Dislutkan	Loteng
2	Pelayanan Penerbitan Ijin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan ikan yang usahanya , lokasi dan/atau manfaat atau dampak negatifnya dalam 1 daerah Kabupaten/Kota yang menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, intensif serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing	Jumlah Dokumen Penerbitan Ijin Usaha Perikanan yang menggunakan teknologi sederhana/Semi intensif dan intensif dalam daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0.00	0.00	0	2.00	20,000,000	4.00	40,000,000	6.00	60,000,000	8.00	80,000,000	10.00	100,000,000	10.00	Dislutkan	Loteng
	Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan Menerapkan Teknologi Budidaya Perikanan (Kelompok)	2.00	3.00	11,580,629	22.00	164,161,258	28.00	239,124,483	30.00	256,046,973	33.00	278,527,912	34.00	286,568,471	34.00	Dislutkan	Loteng
1.00	Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	Meningkatnya Pengetahuan dan ketrampilan Pembudidaya Ikan (Orang)	10.00	30.00	11,580,629	60.00	23,161,258	60.00	23,624,483	60.00	24,096,973	60.00	24,578,912	60.00	25,070,491	330.00	Dislutkan	Loteng

2.00	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan pengembangan kelembagaan pembudidayaan ikan kecil	terfasilitasinya pembentukan dan pembinaan pokdakan	15.00	20.00	0	25.00	45,000,000	30.00	63,000,000	35.00	72,000,000	40.00	75,000,000	45.00	80,000,000	45.00	Dislutkan	Loteng
3.00	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan pendanaan, Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Pokdakan yang mendapat akses permodalan (Kelompok)	6.00	1.00	0	8.00	15,000,000	10.00	30,000,000	12.00	35,000,000	15.00	51,500,000	18.00	51,500,000	18.00	Dislutkan	Loteng
4.00	Pemberian Pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	jumlah pembudidaya yang mengikuti pelatihan (orang)	10.00	0.00	0	60.00	81,000,000	90.00	122,500,000	90.00	124,950,000	90.00	127,449,000	90.00	129,997,980	420.00	Dislutkan	Loteng
Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar bagi pembudidaya ikan kecil (TDPIK) dalam 1 daerah Kabupaten/Kota			0.00	0.00	0	600.00	35,000,000	1,200.00	40,000,000	1,800.00	45,000,000	2,400.00	50,000,000	3,000.00	55,000,000	3,000.00	Dislutkan	Loteng
1.00	Penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan tanda daftar bagi pembudidayaan ikan kecil (TDPIK) dalam 1 daerah kabupaten/kota	Jumlah SOP Penertiban TDPIK di Kab.Loteng (Dokumen)	0.00	0.00	0	1.00	15,000,000	1.00	15,000,000	1.00	15,000,000	1.00	15,000,000	1.00	15,000,000	1.00	Dislutkan	Loteng
2.00	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Penertiban TDPIK di Kab.Loteng (Dokumen)	0.00	0.00	0	600.00	20,000,000	1,200.00	25,000,000	1,800.00	30,000,000	2,400.00	35,000,000	3,000.00	40,000,000	3,000.00	Dislutkan	Loteng
Kegiatan Pengelolaan Pembudidaya Ikan			293.00	336.00	2,833,917,436	360.00	4,154,860,468	367.00	4,579,681,282	374.00	4,772,323,720	382.00	5,292,273,232	390.00	5,883,708,200	2,209.00	Dislutkan	Loteng

	1.00	Penyediaan Data dan Informasi pembudidayaan ikan kecil dalam 1 daerah kabupaten/kota	Jumlah Publikasi data dan informasi Bid Usaha Perikanan Budidaya (Dokumen)	2.00	2.00	0	2.00	23,500,000	2.00	40,000,000	2.00	30,000,000	2.00	35,000,000	2.00	40,000,000	2.00	Dislutkan	Loteng
	2.00	Penyediaan prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 daerah kabupaten/kota	Jumlah Penyediaan Unit Prasarana Budidaya Ikan (Unit)	5.00	37.00	1,312,971,328	40.00	1,352,360,468	40.00	1,392,931,282	40.00	1,434,719,220	40.00	1,477,760,797	40.00	1,522,093,621	237.00	Dislutkan	Loteng
	3.00	Pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya dalam 1 daerah kabupaten/kota	Uji Sampel Kesehatan Ikan dan habitat (kali)	4.00	5.00	0	8.00	155,000,000	8.00	159,650,000	8.00	164,439,500	8.00	169,372,685	8.00	174,453,866	40.00	Dislutkan	Loteng
	4.00	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Laporan Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat (dokumen)	4.00	5.00	0	12.00	20,000,000	19.00	30,000,000	26.00	30,000,000	33.00	30,000,000	40.00	30,000,000	40.00	Dislutkan	Loteng
	5.00	Perencanaan, dan pengembangan pemanfaatan air untuk pembudidayaan ikan di darat	Jumlah Kajian Pengembangan Pemanfaatan air untuk Budidaya di Darat (Dokumen)	0.00	0.00	0	1.00	250,000,000	1.00	250,000,000							2.00	Dislutkan	Loteng
	6.00	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan ikan dalam 1 daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana Pembudidayaan Ikan yang tersedia (Unit)	278.00	287.00	1,520,946,108	297.00	2,354,000,000	297.00	2,707,100,000	298.00	3,113,165,000	299.00	3,580,139,750	300.00	4,117,160,713	1,778.00	Dislutkan	Loteng
Meningkatkan Produktivitas Pengolahan Hasil Perikanan			Persentase Laju Pertumbuhan Produksi Pengolahan hasil Perikanan (%)	2.00	2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00				
			TK. Konsumsi Ikan Masyarakat (Kg/Kapita/Tahun)	34.39	35.25		36.10		37.34		39.05		40.83		42.97				
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Meningkatnya Produksi Pengolahan Hasil Perikanan (Ton)	4,405.45	4,493.56	700,000,000	4,583.43	1,280,000,000	4,675.10	1,367,000,000	4,768.60	1,441,200,000	4,863.97	1,522,820,000	4,961.25	1,592,102,000	4,961.25	Dislutkan	Loteng

		Meningkatnya Produksi Garam Rakyat (Ton)	3,438.15	3,472.53		3,507.26		3,507.26		3,577.75		3,613.53		3,649.67		3,649.67		
	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Rekomendasi Usaha Pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yg difasilitasi penerbitannya (Dokumen)	0.00	0.00	0.00	10.00	220,000,000	11.00	242,000,000	12.00	266,200,000	13.00	292,820,000	14.00	322,102,000	60.00	Dislutkan	Loteng
1.00	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil perikanan (Dokumen)	0.00	0.00	0	10.00	220,000,000	11.00	242,000,000	12.00	266,200,000	13.00	292,820,000	14.00	322,102,000	60.00	Dislutkan	Loteng
	Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Pengujian produk olahan hasil perikanan (Dokumen)	56.00	0.00	0	4.00	330,000,000	4.00	350,000,000	4.00	375,000,000	4.00	390,000,000	4.00	400,000,000	20.00	Dislutkan	Loteng
1.00	Pelaksanaan Bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	Jumlah Pelaku Usaha pengolah dan pemasar yang terbina (Kelompok)	56.00	0.00	0	56.00	330,000,000	60.00	350,000,000	63.00	375,000,000	66.00	390,000,000	69.00	400,000,000	69.00	Dislutkan	Loteng
	Kegiatan Penyediaan dan penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ikan dan garam yang tersalurkan sebagai bahan baku industri (Ton)	44,394.00	45,300.00	700,000,000	46,206.00	730,000,000	47,130.00	775,000,000	48,072.00	800,000,000	49,033.00	840,000,000	50,013.00	870,000,000	50,013.00	Dislutkan	Loteng
1.00	Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan (Kelompok)	56.00	12.00	700,000,000	12.00	730,000,000	12.00	775,000,000	12.00	800,000,000	13.00	840,000,000	10.00	870,000,000	71.00	Dislutkan	Loteng
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan dan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD (poin)			5,786,741,713		6,365,375,804		7,001,913,355		7,702,104,690		8,472,315,428		9,319,546,942		Dislutkan	Praya

	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evakuasi kinerja yang tersusun (Dokumen)	7.00	7.00	80,501,652.00	7.00	88,657,607.20	7.00	97,543,967.92	7.00	107,298,364.71	7.00	118,028,201.18	7.00	129,831,019.80	7.00	Dislutkan	Praya
	1.00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan (Dokumen)	1.00	1.00	16,350,120	1.00	17,985,132	1.00	19,783,645	1.00	21,762,010	1.00	23,938,211	1.00	26,332,032	1.00	Dislutkan	Praya
	2.00 Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang tersusun (Dokumen)	1.00	1.00	900,000	1.00	1,000,000	1.00	1,100,000	1.00	1,210,000	1.00	1,331,000	1.00	1,464,100	1.00	Dislutkan	Praya
	3.00 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan yang tersusun (Dokumen)	1.00	1.00	2,317,500	1.00	2,575,000	1.00	2,832,500	1.00	3,115,750	1.00	3,427,325	1.00	3,770,057	1.00	Dislutkan	Praya
	4.00 Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA yang tersusun (Dokumen)	1.00	1.00	2,317,500	1.00	2,575,000	1.00	2,832,500	1.00	3,115,750	1.00	3,427,325	1.00	3,770,057	1.00	Dislutkan	Praya
	5.00 Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah DPA Perubahan yang tersusun (Dokumen)	1.00	1.00	2,317,500	1.00	2,575,000	1.00	2,832,500	1.00	3,115,750	1.00	3,427,325	1.00	3,770,057	1.00	Dislutkan	Praya
	6.00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dokumen)	1.00	1.00	54,630,432	1.00	60,093,475	1.00	66,102,823	1.00	72,713,105	1.00	79,984,415	1.00	87,982,857	1.00	Dislutkan	Praya
	7.00 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kinerja (Dokumen)	1.00	1.00	1,668,600	1.00	1,854,000	1.00	2,060,000	1.00	2,266,000	1.00	2,492,600	1.00	2,741,860	1.00	Dislutkan	Praya
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Keuangan yang tersusun (Dokumen)	26.00	26.00	4,816,126,823	26.00	5,297,699,504	26.00	5,827,469,455	26.00	6,410,216,400	26.00	7,051,238,309	26.00	7,756,362,112	26.00	Dislutkan	Praya
	1.00 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN (bulan)	12.00	12.00	4,723,769,572	12.00	5,196,146,529	12.00	5,715,761,182	12.00	6,287,337,300	12.00	6,916,071,300	12.00	7,607,678,403	12.00	Dislutkan	Praya
	2.00 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Akuntansi SKPD (Laporan)	1.00	1.00	1,400,000	1.00	1,500,000	1.00	1,650,000	1.00	1,815,000	1.00	1,996,500	1.00	2,196,150	1.00	Dislutkan	Praya

3.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun (Laporan)	1.00	1.00	17,846,914	1.00	19,631,605	1.00	21,594,766	1.00	23,754,243	1.00	26,129,667	1.00	28,742,633	1.00	Dislutkan	Praya
4.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan (Laporan)	12.00	12.00	73,110,337	12.00	80,421,370	12.00	88,463,507	12.00	97,309,857	12.00	107,040,842	12.00	117,744,926	12.00	Dislutkan	Praya
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah	Dokumen BMD yang tersusun (Dokumen)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	35,000,000.00	2.00	36,000,000.00	2.00	37,100,000.00	2.00	38,310,000.00	2.00	Dislutkan	Praya
1.00	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan BMD (Dokumen)	0.00	0.00	0	0.00	0	1.00	25,000,000	1.00	25,000,000	1.00	25,000,000	1.00	25,000,000	1.00	Dislutkan	Praya
2.00	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah BA. Rekonsiliasi BMD (Dokumen)	0.00	0.00	0	0.00	0	1.00	10,000,000	1.00	11,000,000	1.00	12,100,000	1.00	13,310,000	1.00	Dislutkan	Praya
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi (Jenis)	24.00	10.00	138,769,576.00	10.00	189,646,465.00	10.00	221,211,110.00	10.00	244,052,221.00	10.00	269,211,442.00	10.00	297,048,386.00	10.00	Dislutkan	Praya
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik /Penerangan yang tersedia (Jenis)	1.00	1.00	8,798,602	1.00	9,678,400	1.00	10,646,240	1.00	11,710,864	1.00	12,881,950	1.00	14,170,145	1.00	Dislutkan	Praya
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia (unit)	0.00	10.00	6,872,086.00	12.00	24,059,290.00	19.00	38,465,220.00	19.00	42,311,742.00	19.00	46,432,916.00	19.00	50,955,207.00	98.00	Dislutkan	Praya
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan rumah tangga yang tersedia (Jenis)	0.00	0.00	0	5.00	2,500,000	5.00	2,750,000	5.00	3,025,000	5.00	3,327,500	5.00	3,660,250	5.00	Dislutkan	Praya
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Logistik yang tersedia (bulan)	12.00	12.00	35,460,000	12.00	39,006,000	12.00	42,906,600	12.00	47,197,260	12.00	51,916,986	12.00	57,108,685	12.00	Dislutkan	Praya
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia (bulan)	0.00	0.00	0	12.00	12,000,000	12.00	13,200,000	12.00	14,520,000	12.00	15,972,000	12.00	17,569,200	12.00	Dislutkan	Praya
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Layanan Kunjungan Tamu (bulan)	0.00	0.00	0	12.00	6,000,000	12.00	7,200,000	12.00	8,640,000	12.00	10,368,000	12.00	12,441,600	12.00	Dislutkan	Praya

	7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan hasil koordinasi dan konsultasi (Laporan)	11.00	16.00	87,638,888	17.00	96,402,775	18.00	106,043,050	19.00	116,647,355	20.00	128,312,090	21.00	141,143,299	26.00	Dislutkan	Praya
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Barang Milik Daerah Tercatat (Jenis)	0.00	0.00	0	4.00	240,000,000	6.00	690,500,000	5.00	324,500,000	5.00	338,500,000	5.00	361,500,000	6.00	Dislutkan	Praya
	1.00	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas jabatan roda 4 (unit)	0.00	0.00	0	0.00	0	1.00	380,000,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	1.00	Dislutkan	Praya
			Kendaraan dinas jabatan roda 2 (Unit)	0.00	0.00	0	0.00	0	3.00	73,500,000	3.00	73,500,000	3.00	73,500,000	3.00	73,500,000	12.00	Dislutkan	Praya
	2.00	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebel yang tersedia (Unit)	0.00	0.00	0	1.00	10,000,000	3.00	33,000,000	3.00	34,000,000	3.00	35,000,000	4.00	45,000,000	14.00	Dislutkan	Praya
	3.00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin Unit)	0.00	0.00	0	2.00	20,000,000	2.00	22,000,000	2.00	23,000,000	2.00	24,000,000	2.00	25,000,000	10.00	Dislutkan	Praya
	4.00	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pembangunan Gedung Kantor (Unit)	0.00	0.00	0	2.00	200,000,000	1.00	170,000,000	1.00	180,000,000	1.00	190,000,000	1.00	200,000,000	6.00	Dislutkan	Praya
	5.00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana pendukung Gedung Kantor (Unit)	0.00	0.00	0	2.00	10,000,000	2.00	12,000,000	2.00	14,000,000	2.00	16,000,000	2.00	18,000,000	10.00	Dislutkan	Praya
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Layanan Pemerintah Daerah (Bln)	12.00	12.00	322,655,592	12.00	353,637,151	12.00	389,716,866	12.00	427,404,553	12.00	468,861,008	12.00	514,463,109	12.00	Dislutkan	Praya
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Dinas yang terkirim (jenis)	0.00	0.00	0	0.00	0	2.00	2,000,000	2.00	2,200,000	2.00	2,420,000	2.00	2,662,000	8.00	Dislutkan	Praya
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Layanan Internet (Mega byte)	20.00	20.00	12,840,000	20.00	12,840,000	20.00	12,840,000	20.00	12,840,000	20.00	12,840,000	20.00	12,840,000	20.00	Dislutkan	Praya
			Layanan Air (M3)	750.00	753.00	6,594,000	828.30	7,253,400.00	911.13	7,978,740.00	1,002.24	8,776,614.00	1,102.47	9,654,275.40	1,212.71	10,619,702.94	1,212.71	Dislutkan	Praya
			Layanan Listrik (rekening)	11.00	11.00	257,621,592	11.00	283,383,751.20	11.00	311,722,126.32	11.00	342,894,338.95	11.00	377,183,772.85	11.00	414,902,150.13	11.00	Dislutkan	Praya
	3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Layanan Umum Kantor (Bulan)	12.00	12.00	45,600,000	12.00	50,160,000	12.00	55,176,000	12.00	60,693,600	12.00	66,762,960	12.00	73,439,256	12.00	Dislutkan	Praya

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BMD dalam kondisi Baik (Jenis)	4.00	4.00	235,345,604	4.00	254,202,164	4.00	276,983,381	4.00	302,161,719	4.00	329,547,891	4.00	359,362,680	4.00	Dislutkan	Praya
1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara (Unit)	64.00	64.00	133,348,651	64.00	146,683,516	64.00	161,351,868	64.00	177,487,054	64.00	195,235,760	64.00	214,759,336	64.00	Dislutkan	Praya
2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin yang di service (unit)	9.00	9.00	48,000,000	9.00	48,000,000	10.00	50,000,000	10.00	53,000,000	10.00	56,000,000	11.00	59,000,000	11.00	Dislutkan	Praya
3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor yang terpelihara /rehab (Unit)	1.00	1.00	49,116,953	1.00	54,028,648	1.00	59,431,513	1.00	65,374,664	1.00	71,912,131	1.00	79,103,344	1.00	Dislutkan	Praya
4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan Prasarana Pendukung gedung Kantor yang terpelihara (unit)	8.00	8.00	4,880,000	9.00	5,490,000	10.00	6,200,000	10.00	6,300,000	10.00	6,400,000	10.00	6,500,000	10.00	Dislutkan	Praya
5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Kondisi sarana dan prasarana Gedung Kantor dalam kondisi baik (paket)	0.00	0.00	0.00	1.00	6,800,000					2.00	55,000,000			3.00	Dislutkan	Praya

Mengetahui
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Lombok Tengah,



Ir. Mulya M. KAMRIN
NIP.19651130 199203 1 011

Tabel 6.2
Rekapitulasi kegiatan / Sub Kegiatan Untuk Program Unggulan

No.	JENIS PROGRAM UNGGULAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKAAN PENDANAAN											
				2021		2022		2023		2024		2025		2026	
				Target Kinerja	Jumlah (Rp)	Target Kinerja	Jumlah (Rp)	Target Kinerja	Jumlah (Rp)	Trget Kinerja	Jumlah (Rp)	Trget Kinerja	Jumlah (Rp)	Target Kinerja	Jumlah (Rp)
1	Kampung Nila	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Kecil	a. Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 daerah Kabupaten/Kota, b. Penyediaan prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 daerah kabupaten/ kota	336	2.833.917.436	360	4.154.880.468	387	4.579.681.282	374	4.772.323.720	382	5.292.273.232	390	5.883.708.200
2	Kampung Vanamei	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Kecil	a. Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 daerah Kabupaten/Kota, b. Penyediaan prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 daerah kabupaten/ kota	336	2.833.917.436	360	4.154.880.468	387	4.579.681.282	374	4.772.323.720	382	5.292.273.232	390	5.883.708.200
3	Asuransi Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten / Kota	Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten / Kota	Pengembangan Kapasitas Nelayan	500	104.000.000	500,,	109.200.000	500	114.400.000	500	119.600.000	500	124.800.000	500	130.000.000

4	Indus trialis asi Perik anan Tang kap	a. Pengelola an Penangkap an Ikan diwilayah sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 daErah kabupaten/ kota, b. Pemberday aan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten /Kota dan c. Pengelolaa n dan penyeleng garaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	a. Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap, b. Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap, c. Pengembangan Kapasitas Nelayan dan d. Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	85 pkt	2.356.338.420,-	104	3.544.027.276	112	3.932.040.907	119	4.526.929.920	126	5.085.583.450	136	5.107.484.709
---	---	--	---	--------	-----------------	-----	---------------	-----	---------------	-----	---------------	-----	---------------	-----	---------------

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah maka, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah menetapkan 4 (Empat) Indikator Kinerja yang berasal dari program prioritas yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Berikut Indikator kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD untuk Rencana Strategis Periode 2021–2026 sebagai berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 – 2026

Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi akhir
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Persentase Laju Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap (%)	2.1	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
Nilai Tukar Nelayan (NTN) (%)		102.96	103.95	104.96	105.97	106.99	108.02	108.02
Persentase Laju Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya (%)	2	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) (%)	99.97	100.92	101.87	102.82	103.77	104.72	105.67	105.67
Persentase Laju Pertumbuhan Produksi Pengolahan hasil Perikanan (%)	2	2	2	2	2	2	2	2
TK. Konsumsi Ikan Masyarakat (Kg/Kapita/Tahun)	34.39	35.25	36.10	37.34	39.05	40.83	42.97	42.97

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021- 2026 ini disusun bukan sebagai kewajiban OPD semata, akan tetapi merupakan dokumen yang diharapkan menjadi pedoman dan acuan dalam menentukan arah kebijakan, langkah operasional sekaligus pengendali kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan Kabupaten Lombok Tengah dalam kurun waktu 2021 - 2026. Oleh karena nya setiap pemangku kepentingan (*stakeholders*) diharapkan mempergunakan dokumen Renstra ini sebagai pegangan dalam menentukan program dan kegiatan prioritas serta menetapkan anggaran pembangunan kelautan dan perikanan di Kabupaten Lombok Tengah setiap tahun nya.

Dalam implementasinya, segenap pihak yang terlibat hendaknya juga duduk bersama dan bersinergi dalam melaksanakan kegiatan maupun dalam tahapan monitoring dan evaluasinya. Dengan demikian, niat dan cita-cita luhur yang tertuang dalam indikator kinerja utama pembangunan kelautan dan perikanan di Kabupaten Lombok Tengah diharapkan akan memberikan peningkatan dan kemajuan perekonomian daerah serta kesejahteraan masyarakat Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah.